

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah Kabupaten Malinau, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2021. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu transparan, partisipasi dan akuntabilitas.

Laporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2021 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program, kegiatan, kebijakan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Malinau “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)”.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021.

Malinau, 4 Maret 2022

Bupati Malinau



WEMPI W. MAWA, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT
Jl. Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301402/409
MALINAU

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2021 menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Malinau. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2021 telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2021.

Malinau, 20 Mei 2022

Pit. INSPEKTUR,

Dr. Muhammad Fiteriady, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19790829 199810 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
- c. Partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 telah menetapkan 23 sasaran dengan 29 indikator kinerja. Kesemuanya diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Sedangkan pelaksana program dan kegiatan tersebut adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malinau.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,29	13,28	99,92%
		Rata-Rata Lama Sekolah	9,07	8,95	98,67%
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	73,00	71,49	97,93%
		Prevalensi Balita Stunting	19	11,04	141,89%
3	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin	7,04	7,30	96,30%
4	Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam musrenbang	40,21	37,09	92,24%
5	Meningkatnya infrastruktur daerah baik perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	25,04	45,10	180,11%
		Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas	100	100	100%
6	Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi	100	95,41	95,41%
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan	Pendapatan perkapita masyarakat	130.147.622	143.900.000	110,56%
8	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks Gini	0,296	0,341	84,79%
9	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	8,47	4,14	151,12%
10	Mengembangkan produk unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan	100	100	100%
11	Meningkatnya nilai tambah dan	Tingkat pertumbuhan	8,26	11,05	133,77%



	pendapatan dari sektor perdagangan	perdagangan			
12	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan industri	18,70	22,72	121,49%
13	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio Tempat Ibadah per Penduduk	1:250	1:290	86,21%
14	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase konflik antar suku, agama dan ras	0	0	100%
15	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	0<IP<1,0	3,39	342,42%
		Indeks kualitas udara (ISPU)	0-50	96,21	192,42%
16	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	100%
		Nilai SAKIP	A	CC	71,42%
		Nilai LPPD	Sangat Tinggi		
17	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	100	74,46	74,46%
18	Meningkatnya Pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	85	74,82	88,03%
19	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	95	97	102,10%
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	8.000	15.811	197,63%
21	Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	100	100	100%
22	Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	100	0	0%



		(Cagar Budaya)			
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	100%



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Reviu	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALINAU	2
C. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU	9
D. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	12
E. MAKSUD DAN TUJUAN	28
F. SUMBER DAYA MANUSIA	30
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN	31

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021	34
1. VISI	34
2. MISI	37
3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	38
4. INDIKATOR KINERJA	40
5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
6. PROGRAM	44
B. RENCANA KERJA TAHUNAN	46
G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	49

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	53
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	54
C. REALISASI ANGGARAN	184

BAB IV PENUTUP	186
-----------------------------	-----

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten malinau	7
Tabel 1.2	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021	8
Tabel 1.3	Data ASN Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Golongan	30
Tabel 3.1	Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Mutu Pendidikan.....	57
Tabel 3.1.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	57
Tabel 3.1.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	58
Tabel 3.1.3	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	59
Tabel 3.1.4	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	59
Tabel 3.1.5	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021.....	63
Tabel 3.2	Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	64
Tabel 3.2.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	65
Tabel 3.2.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	65
Tabel 3.2.3	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	66
Tabel 3.2.4	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	67
Tabel 3.2.5	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021.....	70
Tabel 3.3	Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan	73
Tabel 3.3.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	73
Tabel 3.3.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	74
Tabel 3.3.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021.....	76
Tabel 3.4	Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Partisipatif Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa	77
Tabel 3.4.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	77
Tabel 3.4.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	78
Tabel 3.4.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021.....	80
Tabel 3.5	Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya Infrastruktur Daerah Baik Di perkotaan Maupun Perdesaan.....	82
Tabel 3.5.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja	



	Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	82
Tabel 3.5.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	83
Tabel 3.5.3	Data Status Jalan Kabupaten Malinau	85
Tabel 3.5.4	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021.....	86
Tabel 3.5.5	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	89
Tabel 3.5.6	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	90
Tabel 3.5.7	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	92
Tabel 3.6	Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	95
Tabel 3.6.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	95
Tabel 3.6.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	96
Tabel 3.6.3	Kondisi Akses Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Malinau.....	97
Tabel 3.6.4	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021.....	102
Tabel 3.7	Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpuh pada ekonomi desa dan perkotaan	103
Tabel 3.7.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	104
Tabel 3.7.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	104
Tabel 3.7.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	106
Tabel 3.8	Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	107
Tabel 3.8.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	108
Tabel 3.8.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	108
Tabel 3.9	Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Terbukanya Lapangan Pekerjaan	110
Tabel 3.9.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	110
Tabel 3.9.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	111
Tabel 3.9.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kegiatan.....	112
Tabel 3.9.4	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021.....	114
Tabel 3.10	Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Mengembangkan produk unggulan	114
Tabel 3.10.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	115
Tabel 3.10.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja	



Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	115
Tabel 3.10.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	117
Tabel 3.11 Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	119
Tabel 3.11.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	119
Tabel 3.11.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	120
Tabel 3.11.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	121
Tabel 3.12 Evaluasi Pencapaian Sasaran 12 Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	122
Tabel 3.12.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	123
Tabel 3.12.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	123
Tabel 3.12.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	125
Tabel 3.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran 13 Meningkatkan Fasilitas Layanan Keagamaan	126
Tabel 3.13.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	126
Tabel 3.13.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	127
Tabel 3.13.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	128
Tabel 3.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 14 Terjaganya Keamanan dan Ketertiban dari Konflik SARA	128
Tabel 3.14.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	129
Tabel 3.14.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	130
Tabel 3.14.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	131
Tabel 3.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 15 Meningkatkan kualitas air dan udara	132
Tabel 3.15.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	133
Tabel 3.15.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	134
Tabel 3.15.3 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	134
Tabel 3.15.4 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	135
Tabel 3.15.5 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	139
Tabel 3.16 Evaluasi Pencapaian Sasaran 16 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.....	141
Tabel 3.16.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	143
Tabel 3.16.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja	



Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	143
Tabel 3.16.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	146
Tabel 3.16.4 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	150
Tabel 3.16.5 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	150
Tabel 3.16.6 Capaian kinerja SAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2021	151
Tabel 3.16.7 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	154
Tabel 3.16.8 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	155
Tabel 3.17 Evaluasi Pencapaian Sasaran 17 Meningkatkan kesetaraan gender	156
Tabel 3.17.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	157
Tabel 3.17.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	157
Tabel 3.17.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	159
Tabel 3.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran 18 Meningkatkan pemberdayaan gender	160
Tabel 3.18.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	160
Tabel 3.18.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	161
Tabel 3.18.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	162
Tabel 3.19 Evaluasi Pencapaian Sasaran 19 Meningkatkan kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	163
Tabel 3.19.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	164
Tabel 3.19.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	164
Tabel 3.19.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	167
Tabel 3.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 20 Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	169
Tabel 3.20.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	170
Tabel 3.20.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	170
Tabel 3.20.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	172
Tabel 3.21 Evaluasi Pencapaian Sasaran 21 Meningkatkan Kualitas Seni dan Budaya Daerah	173
Tabel 3.21.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	174
Tabel 3.21.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	174
Tabel 3.21.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	178



Tabel 3.22	Evaluasi Pencapaian Sasaran 22 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah	179
Tabel 3.22.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	180
Tabel 3.22.2	Daftar Situs Cagar Budaya Kabupaten Malinau	180
Tabel 3.23	Evaluasi Pencapaian Sasaran 23 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	182
Tabel 3.23.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	183
Tabel 3.23.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	183
Tabel 3.23.3	Tabel peringkat hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pemerintah Kabupaten malinau tahun 2021	184
Tabel 3.23.4	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	186
Tabel 4.1	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021....	187



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Malinau menuju *good government* dan *clean government* itulah maka jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau berusaha menyajikan Laporan Kinerja untuk kegiatan Tahun 2021. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, wajib dilaksanakan secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2021 ini disusun dalam empat bab masing-masing Bab I merupakan Pendahuluan, Bab II berisi Perencanaan Kinerja, Bab III berisi Akuntabilitas Kinerja, Bab IV berisi Penutup.

Materi yang disajikan pada laporan ini didasarkan atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021. Substansi pelaporan didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang pada gilirannya pelaporan ini prinsipnya menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam visi, misi dan program strategis RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD), berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan konsep *good governance*, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan pada tahun 2021.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALINAU

Kabupaten Malinau, yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu daerah yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. KONDISI GEOGRAFIS

Sesuai dengan kondisi geografis, Kabupaten Malinau beriklim tropikahumida dengan curah hujan berkisar antara 2.500 ≥ 4.500 mm per tahun, temperatur udara rata-rata 26 °C dengan perbedaan temperatur siang dan malam antara 5°C – 7 °C, temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan Nopember sampai dengan Januari, sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Oktober.



Kabupaten Malinau termasuk Kabupaten yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang sangat potensial dan bervariasi jenisnya, antara lain, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan budi daya hasil-hasilnya, pertambangan (batu bara, pasir kuarsa, emas, dll) dan pariwisata.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kabupaten yang berbatasan dengan Malinau oleh Tim Penegasan Batas Daerah (BPD) Kabupaten Malinau sampai dengan tahun 2021, maka luas wilayah Kabupaten Malinau sebesar 38.973,56 km² yang merupakan daratan dengan topografi bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng, dan ketinggian dari permukaan laut dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 81.925 jiwa.

Sebagai daerah pegunungan dan perbukitan, Kabupaten Malinau memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata dan konservasi alam. Akan tetapi jika dilihat dari letak geografisnya, wilayah Kabupaten Malinau memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah perdagangan karbon, karena 91 % wilayahnya masih berupa hutan murni.

2. KONDISI DEMOGRAFIS

1. Letak Geografis

Kabupaten Malinau merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16 November 2012. Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Malinau terletak antara 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" Bujur Timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" Lintang Utara. Secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Tanah Tidung, Berau dan Kutai Timur; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Mahakam Hulu, dan Kutai Kartanegara; dan sebelah barat berbatasan dengan Negara Malaysia Timur (Serawak).

Secara Administratif Kabupaten Malinau berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Nunukan.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Hulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Timur (Serawak).



Gambar 1.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan, 5 Kecamatan diantaranya berbatasan langsung dengan negara Malaysia, 2 Kecamatan merupakan penyangga perbatasan (lihat Gambar 1.1), di mana Kabupaten Malinau termasuk sebagai Kabupaten perbatasan yang hanya dapat terjangkau melalui transportasi sungai dan udara yang menuntut biaya sangat tinggi dalam upaya peningkatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan



kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau.

Keadaan topografi Kabupaten Malinau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Selanjutnya juga dapat dibedakan atas kawasan perbukitan terjal di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang bagian tengah, dan daratan bergelombang landai di bagian timur. Perbukitan terjal di sebelah utara bagian barat merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m – 3.000 m di atas permukaan laut. Keadaan perbukitan lereng ini memiliki sudut lereng lebih dari 30% dan untuk daerah yang merupakan dataran tinggi, kemiringan berkisar 8 – 15%. Sedangkan untuk daerah perbukitan, kemiringan sangat terjal di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0-50%.

Ditinjau dari segi administrasi, wilayah Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan, yakni:

1. **Kecamatan Malinau Kota**, terdiri atas 6 desa yakni: Desa Malinau Kota, Desa Malinau Hulu, Desa Malinau Hilir, Desa Tanjung Keranjang, Desa Batu Lidung, Desa Pelita Kanaan;
2. **Kecamatan Malinau Utara**, terdiri atas 12 desa yakni: Desa Respen Tubu, Desa Semenggaris, Desa Putat, Desa Malinau Seberang, Desa Luso, Desa Belayan, Desa Kalamok, Desa Lubak Manis, Desa Kelapis, Desa Salap, Desa Seruyung, Desa Sembuak Warod;
3. **Kecamatan Malinau Barat**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Tanjung Lapang, Desa Kuala Lapang, Desa Taras, Desa Sesua, Desa Sempayang, Desa Sentaban, Desa Long Knipe, Desa Long Bila, Desa Punan Bengalun;
4. **Kecamatan Malinau Selatan**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Paya Saturan, Desa Punan Rian, Desa Laban Nyarit, Desa Nunuk Tanah Kibang, Desa Langap, Desa Long Loreh, Desa Sengayan, Desa Pelencau, Desa Bila Bekayuk;
5. **Kecamatan Mentarang**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Long Bisai, Desa Paking, Desa Long Gafid, Desa Harapan Maju, Desa Mentarang Baru, Desa Temalang, Desa Long Liku, Desa Lidung Keminci, Desa Pulau Sapi;



6. **Kecamatan Mentarang Hulu**, terdiri atas 7 desa yakni: Desa Lung Barang, Desa Lung Sulit, Desa Lung Mekatif, Desa Lung Kebinu, Desa Semamu, Desa Lung Pala dan Desa Lung Simau;
7. **Kecamatan Pujungan**, terdiri atas 9 desa yakni : Desa Long Lame, Desa Long Aran, Desa Long Pua, Desa Long Paliran, Desa Belaka Pitau, Desa Long Jelet, Desa Long Ketaman, Desa Pujungan, Desa Long Bena;
8. **Kecamatan Bahau Hulu**, terdiri atas 6 desa yakni : Desa Long Alango, Desa Long Tebulo, Desa Long Uli, Desa Long Kemuat, Desa Long Berini, Desa Apau Ping;
9. **Kecamatan Sungai Boh**, terdiri atas 6 desa yakni : Desa Mahak Baru, Desa Dumu Mahak, Desa Long Lebusan, Desa Agung Baru, Desa Data Baru, Desa Long Top;
10. **Kecamatan Kayan Hulu**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Nawang Baru, Desa Long Temuyat, Desa Long Payau, Desa Long Betaoh, Desa Long Nawang;
11. **Kecamatan Kayan Hilir**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Data Dian, Desa Sungai Anai, Desa Long Sule, Desa Long Metun, Desa Long Pipa;
12. **Kecamatan Kayan Selatan**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Long Ampung, Desa Long Uro, Desa Metulang, Desa Sungai Barang, Desa Lidung Payau;
13. **Kecamatan Malinau Selatan Hulu**, terdiri atas 8 Desa yakni : Desa Long Lake, Desa Punan Mirau, Desa Long Rat, Desa Halanga, Desa Metut, Desa Long Jalan, Desa Nahakramo Baru, Desa Tanjung Nanga.
14. **Kecamatan Malinau Selatan Hilir**, terdiri atas 8 Desa yakni : Desa Setulang, Desa Setarap, Desa Punan Setarap, Desa Batu Kajang, Desa Gong Solok, Desa Punan Gong Solok, Desa Long Adiu dan Desa Punan Long Adiu;
15. **Kecamatan Sungai Tubu**, terdiri dari 5 Desa yakni Desa Long Titi, Desa Long Ranau, Desa Rian Tubu, Desa Long Nyau, Desa Long Pada.

2. Gambaran Umum Demografis

Masalah kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat vital yaitu sebagai objek maupun subjek dari pembangunan itu sendiri.



Kondisi kependudukan dapat dilihat dari tingkat kelahiran, kematian dan mutasi penduduk. Sedangkan untuk menentukan sasaran pembangunan data kependudukan sangat diperlukan baik mengenai jumlah, jenis kelamin, struktur, komposisi maupun penyebaran/kepadatan penduduk suatu wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Malinau semester II tahun 2021 sebanyak 81.925 jiwa yang terdiri dari 43.151 laki-laki dan 38.774 perempuan.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Malinau terbesar ada di Kecamatan Malinau Kota sebesar 25.596 jiwa, disusul Kecamatan Malinau Utara sebesar 15.035 jiwa dan Malinau Barat sebesar 11.274 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil ada di Kecamatan Sungai Tubu sebesar 918 jiwa dan Kecamatan Mentarang Hulu sebesar 1.055 jiwa.

Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang paling luas wilayahnya pasca pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Utara (UU No. 20 tahun 2012) yakni sekitar 54,8 persen dari luas Provinsi Kalimantan Utara, dengan jumlah penduduk yang paling sedikit. Ini berarti bahwa kurang seimbangnya antara jumlah penduduk dengan luas Kabupaten Malinau.

Tabel 1.1**Luas Wilayah Kabupaten Malinau Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
			Km ²	%
1	Malinau Kota	6	142,07	0,36
2	Malinau Utara	12	1.091,18	2,80
3	Malinau Barat	9	765,41	1,97
4	Malinau Selatan	9	1.154,79	2,97
5	Mentarang	9	535,15	1,38
6	Mentarang Hulu	7	2.807,20	7,20
7	Pujungan	9	6.515,59	16,71
8	Bahau Hulu	6	3.103,38	7,97
9	Sungai Boh	6	2.801,51	7,19
10	Kayan Hulu	5	735,40	1,89
11	Kayan Hilir	5	11.863,19	30,43
12	Kayan Selatan	5	2.471,50	6,34
13	Malinau Selatan Hulu	8	2.171,21	5,58
14	Malinau Selatan Hilir	8	572,20	1,46
15	Sungai Tubu	5	2.243,78	5,75
Jumlah		109	38,973,56	100

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2021



Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Malinau pada semester II tahun 2021, penduduk Kabupaten Malinau berjumlah 81.925 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 43.151 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 38.774 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Perkecamatan Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Mentarang	3.120	2.923	6.043
2	Malinau Kota	13.266	12.330	25.596
3	Pujungan	952	805	1.757
4	Kayan Hilir	873	698	1.571
5	Kayan Hulu	1.278	1.163	2.441
6	Malinau Selatan	2.642	2.245	4.887
7	Malinau Utara	8.002	7.033	15.035
8	Malinau Barat	5.925	5.349	11.274
9	Sungai Boh	1.329	1.128	2.457
10	Kayan Selatan	1.036	982	2.018
11	Bahau Hulu	764	620	1.384
12	Mentarang Hulu	551	504	1.055
13	Malinau Selatan Hilir	1.591	1.401	2.992
14	Malinau Selatan Hulu	1.333	1.164	2.497
15	Sungai Tubu	489	429	918
Jumlah		43.151	38.774	81.925

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 semester II

**C. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau diberikan kewenangan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksudkan di atas terdiri atas kewenangan wajib meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malinau juga menyelenggarakan urusan lain-lain yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.



Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau. Perangkat daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- 1) Sekretariat Daerah (Tipe A);
- 2) Sekretariat DPRD (Tipe C);
- 3) Inspektorat Daerah (Tipe A);
- 4) Dinas Daerah;
- 5) Badan Daerah;
- 6) Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain; dan
- 7) Kecamatan

Sekretariat Daerah terdiri atas:

1. Bagian Hukum
2. Bagian Tata Pemerintahan
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam
5. Bagian Administrasi Pembangunan
6. Bagian Barang dan Jasa
7. Bagian Umum
8. Bagian Organisasi
9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
10. Bagian Perencanaan dan keuangan

Dinas Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan (Tipe B);
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Tipe A);
3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe B);
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A);
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial (Tipe A);
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe B);
7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A);
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A);
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe C);



10. Dinas Ketenagakerjaan (Tipe C)
11. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe B);
12. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe A);
13. Dinas Perhubungan (Tipe C);
14. Dinas Ketahanan Pangan (Tipe B);
15. Dinas Pertanian (Tipe C);
16. Dinas Perikanan (Tipe C);
17. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B);
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Tipe A).

Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Tipe A);
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tipe A);
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Tipe C);

Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain terdiri dari:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Tipe A)

Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Malinau Kota (Tipe A);
2. Kecamatan Malinau Utara (Tipe A);
3. Kecamatan Malinau Barat (Tipe A);
4. Kecamatan Malinau Selatan (Tipe A);
5. Kecamatan Mentarang (Tipe A);
6. Kecamatan Mentarang Hulu (Tipe A);
7. Kecamatan Pujungan (Tipe A);
8. Kecamatan Bahau Hulu (Tipe A);
9. Kecamatan Sungai Boh (Tipe A);
10. Kecamatan Kayan Hulu (Tipe A);
11. Kecamatan Kayan Hilir (Tipe A);
12. Kecamatan Kayan Selatan (Tipe A);
13. Kecamatan Malinau Selatan Hulu (Tipe A);
14. Kecamatan Malinau Selatan Hilir (Tipe A); dan
15. Kecamatan Sungai Tubu (Tipe A);

**D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Analisis isu strategis Kabupaten Malinau dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. Selain itu, analisis isu strategis Kabupaten Malinau juga mengidentifikasi strategi dan arah kebijakan yang dapat menjamin upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau dalam lima tahun mendatang (2016-2021).

Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gambaran antara target dan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Malinau.

1. Permasalahan Geografi dan Demografi

Kabupaten Malinau, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 47 tahun 1999, memiliki dua penyebutan sebagai “Kabupaten Perbatasan dan Kabupaten Konservasi” dengan wilayah Kabupaten Malinau yang sangat luas dan sebagian besar merupakan kawasan hutan, dataran dengan aliran sungai, daerah pegunungan, dan kawasan perbatasan serta Luas Wilayah Konservatif tentu memiliki beban pembangunan daerah. Dari sisi kawasan perbatasan, permasalahan utama yang harus di atasi adalah ketertinggalan dan keterisolasian masyarakat desa yang tinggal di daerah pedalaman, pegunungan dan perbatasan; serta kesenjangan antar desa. Dari sisi kawasan konservatif Kabupaten Malinau terbatas untuk mengelola kawasan hutan produktif yang menghambat eksploitasi hutan guna kepentingan masyarakat dalam konteks pembangunan daerah.

Melihat dari pertumbuhan penduduk Kabupaten Malinau dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan yang cukup tinggi ini diindikasikan karena adanya perpindahan penduduk yang datang ke Malinau (imigrasi). Di satu sisi, pertambahan penduduk akan menjadi potensi peningkatan produksi. Di sisi lain, pertambahan penduduk akan menjadi beban daerah apabila penduduk dari luar daerah tidak mempunyai keterampilan dan tidak mempunyai permodalan. Permasalahan yang harus di atasi adalah kurang meratanya persebaran



penduduk antar kecamatan, belum tertatanya administrasi kependudukan, dan terbatasnya prasarana dan sarana publik.

Selain itu, sebagai dampak dari penurunan harga komoditas tambang dan perkebunan, perlambatan kegiatan pertambangan dan perkebunan, pemutusan hubungan kerja, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Malinau cenderung meningkat. Permasalahan yang harus di atasi adalah belum efektifnya program dan kegiatan yang bersifat padat karya dari SKPD dan belum adanya realisasi kerjasama investasi dengan pelaku usaha untuk menciptakan kesempatan kerja baru.

2. Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat

a. Perekonomian Daerah

Melihat dampak penurunan permintaan komoditas pertambangan dan perkebunan membawa dampak terjadinya penurunan produksi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau. Permasalahan yang harus diatasi adalah belum optimalnya kerjasama antar perangkat daerah dalam mendorong percepatan dan pemulihan ekonomi daerah, belum adanya sinergi antara perangkat daerah dan pemerintah desa dalam mendorong pengembangan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan, belum berkembangnya kerjasama investasi dan perdagangan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah.

Struktur ekonomi Kabupaten Malinau saat ini menunjukkan dominasi kegiatan berbasis sumber daya alam terutama pertanian, pertambangan dan penggalian dengan total sumbangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Malinau secara rata-rata lebih dari 50 persen. Tingginya ketergantungan pada pertambangan dan penggalian membuat perekonomian Kabupaten Malinau sangat rentan terhadap gejolak dan fluktuasi harga batubara di pasar internasional. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

**b. Permasalahan Pembangunan Manusia**

Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malinau menunjukkan kemajuan pembangunan terutama pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah terbatasnya tenaga pendidikan dan kesehatan, dan terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan; serta belum optimalnya pengembangan ekonomi masyarakat dan daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

c. Permasalahan Kemiskinan

Penduduk Kabupaten Malinau sebagian besar tinggal di daerah perdesaan dengan taraf hidup yang terbatas. Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan terutama Gerakan Desa Membangun telah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang semakin membaik.

Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Malinau bersifat multidimensi tidak hanya menyangkut rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan pemenuhan hak dasar rakyat atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi. Permasalahan yang harus diatasi adalah belum optimalnya kerjasama antar OPD dalam mendorong pemenuhan hak-hak dasar rakyat perdesaan terutama dalam hal penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi; belum optimalnya kerjasama antar OPD dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat; belum optimalnya pelaksanaan revitalisasi pertanian; serta belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

d. Permasalahan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai universal, diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung pembangunan daerah. Pembangunan kebudayaan di



Kabupaten Malinau bertujuan untuk mengembangkan penanganan kawasan cagar budaya dan desa wisata/budaya, meningkatkan kualitas karya seni, meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa, melestarikan warisan budaya daerah/nasional, Inovasi dan kreatifitas dalam mengelola museum sebagai aset daerah yang bernilai tinggi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

- a) Penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari masih rendah;
- b) Pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal;
- c) Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang;
- d) Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak;
- e) Terbatasnya sarana dan prasarana pelaku budaya/kesenian daerah;
- f) Inovasi dan kreatifitas pelaku kesenian/budaya masih rendah;
- g) Kualitas sumber daya manusia pelaku budaya masih terbatas;
- h) Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap kepedulian sosial.

Selain itu, dalam mewujudkan peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa atau dapat dikatakan sebagai tulang punggung bangsa untuk masa yang akan datang, peranan pemuda sangatlah penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang handal serta dalam pembangunan daerah. Potensi, peran pemuda serta prestasi olahraga yang telah dicapai selama ini cukup berdampak pada kemajuan pembangunan Kabupaten Malinau namun beragam permasalahan dan kendala yang dihadapi menjadi penghambat dalam pengembangan pembangunan kepemudaan dan olahraga. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi:

- a) Akses dan kesempatan bagi pemuda yang tergolong tidak mampu memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah;
- b) Masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, premanisme, narkoba, miras masih cukup tinggi;
- c) Sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga belum memadai;
- d) Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah;



- e) Pemuda belum sebagai “*agent of change*”;
- f) Pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal.

3. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

a. Permasalahan Pendidikan

Angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Malinau untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tercatat masih rendah yang menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum menikmati pendidikan pada jenjang menurut usia. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya jangkauan pelayanan pendidikan menengah dan atas bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Malinau terutama di daerah pedalaman dan perbatasan.

Perluasan jangkauan dan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Malinau sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Sampai saat ini ketersediaan jumlah sekolah dan guru untuk jenjang SMP/MTs masih belum memadai sehingga dapat menghambat pelayanan pendidikan. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan juga terbatasnya jumlah guru untuk setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan.

Pelayanan pendidikan tinggi di Politeknik Kabupaten Malinau terus berkembang. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah masih terbatasnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan lulusan politeknik dan belum berkembangnya kerjasama dengan perguruan tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan di Politeknik Malinau.

b. Permasalahan Kesehatan

Pengembangan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan dan penyediaan obat-obatan. Selain itu, derajat kesehatan masyarakat juga sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat dan ketersediaan pasokan makanan dan gizi; serta perbaikan prasarana dan sarana sanitasi dan lingkungan tempat tinggal.



Permasalahan yang harus diatasi dalam kurun waktu 2016-2021 adalah terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan, belum optimalnya Puskesmas dan Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa; terbatasnya jumlah tenaga kesehatan terutama dokter umum dan dokter spesialis, tenaga farmasi dan ahli gizi untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan; serta belum optimalnya Rumah Sakit Umum Daerah sebagai rumah sakit rujukan.

4. Permasalahan Prasarana dan Sarana Daerah

a. Permasalahan Transportasi

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi sangat penting untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang baik antar desa, antar kecamatan antar kabupaten dan antar negara. Transportasi di Kabupaten Malinau mencakup pengembangan transportasi darat, sungai, laut dan udara. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya jalan beraspal dibanding keseluruhan panjang jalan, dan sebagian besar jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Hal ini menyebabkan kurang lancarnya lalu lintas penduduk dan barang antar desa dan antar kecamatan. Selain itu, pembangunan jalan negara dan jalan provinsi realisasinya selama lima tahun terakhir masih sangat kecil bila dibandingkan dengan total jalan yang dibutuhkan untuk dibangun. Kondisi ini menyiratkan kurangnya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan di Kabupaten Malinau. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya transportasi darat yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat perdagangan dan pemasaran.

Kondisi prasarana dan sarana transportasi darat berupa jalan di Kabupaten Malinau sebagian besar masih berupa jalan tanah. Permasalahan yang harus diatasi adalah terbatasnya akses jalan terutama di daerah pedalaman dan perbatasan untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan barang, membuka keterisolasian dan mempercepat kemajuan desa.



Dari segi intensitas transportasi udara, jumlah penerbangan dan jumlah penumpang di Kabupaten Malinau terus meningkat. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah masih terbatasnya lapangan terbang perintis; serta terbatasnya jangkauan dan jalur penerbangan terutama menuju desa-desa dan kecamatan-kecamatan di daerah pedalaman dan perbatasan.

Transportasi sungai dan laut di Kabupaten Malinau juga terus meningkat terutama transportasi barang dari luar daerah masuk ke Kabupaten Malinau. Permasalahan yang harus diatasi adalah terbatasnya tambatan perahu dan pelabuhan, dan terbatasnya jangkauan transportasi air untuk mengangkut hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

b. Permasalahan Komunikasi dan Informasi

Pengembangan telekomunikasi dan informasi memegang peran sangat penting dalam menghubungkan antar penduduk dan antar desa, memajukan kehidupan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Perkembangan komunikasi dan informasi di Kabupaten Malinau secara bertahap semakin baik. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah masih terbatasnya jaringan komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

c. Permasalahan Air Minum

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Perkembangan rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Malinau menunjukkan adanya perbaikan terhadap akses air bersih. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah belum optimalnya pengelolaan sumber air baku dan terbatasnya jaringan air bersih yang murah dan terjangkau terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

**d. Permasalahan Listrik**

Ketersediaan listrik sangat penting untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Rumah tangga pengguna utama listrik di Kabupaten Malinau telah mencapai lebih dari 60 persen. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah belum optimalnya jangkauan pelayanan listrik bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

5. Isu Strategis

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

(1) Identifikasi dan Analisis Kekuatan Kabupaten Malinau

Berbagai sumber daya sebagai kekuatan yang diperkirakan dapat mendukung pembangunan Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Kabupaten Malinau merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya pertanian dan pertambangan;
- b. Kabupaten Malinau memiliki modal sosial dan budaya yang sangat kuat sehingga menjadi perekat dan pemersatu masyarakat dalam memajukan Kabupaten Malinau;
- c. Kabupaten Malinau memiliki keragaman sumber daya alam hayati yang beragam, dan memiliki potensi jasa lingkungan kehutanan;
- d. Kabupaten Malinau telah mengembangkan desa wisata dan destinasi wisata budaya sebagai modal bagi pengembangan ekonomi wilayah;
- e. Kabupaten Malinau merupakan kabupaten yang sudah berjalan selama 18 tahun sehingga penuh harapan dan dinamika untuk meraih kemajuan;



- f. Kabupaten Malinau berbatasan dengan negara tetangga Malaysia dengan kemiripan dan persamaan budaya lokal yang unik sebagai dasar membangun kemitraan dan kerjasama yang bermanfaat, adil dan saling menguntungkan;
- g. Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) sejak tahun 2012 secara bertahap telah menumbuhkan kesadaran, semangat dan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memajukan kehidupan desa;
- h. Kabupaten Malinau telah melaksanakan berbagai terobosan kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pembangunan daerah terutama di desa dan kecamatan;
- i. Pelaksanaan pemilihan Ketua RT menjadi bagian dari berkembangnya dan manajemen kepemimpinan di tingkat RT yang demokratis, transparan dan akuntabel sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- j. Perkembangan forum partisipasi dan komunikasi pembangunan desa memperkuat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga memperkuat dukungan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Malinau.

(2) Identifikasi dan Analisis Kelemahan Kabupaten Malinau

Berbagai kelemahan yang diperkirakan dapat menghambat kemajuan pembangunan Kabupaten Malinau, yaitu :

- a. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah sehingga akan berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, dan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Belum siapnya masyarakat menghadapi pergeseran budaya dan perkembangan teknologi informasi yang cepat sehingga membawa dampak terjadinya budaya kagetan dan mudarnya nilai-nilai budaya masyarakat Malinau;
- c. Belum meratanya infrastruktur dasar antara lain prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan; prasarana dan sarana air bersih, pembangkit dan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan informasi;



- d. Belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu terutama bagi masyarakat desa;
- e. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan di desa dan kecamatan yang disebabkan oleh belum tertatanya kelembagaan secara memadai, terbatasnya prasarana dan sarana pemerintahan, serta terbatasnya jumlah dan mutu sumber daya aparatur;
- f. Belum berkembangnya adanya industri hilir yang mampu mengolah sumber daya alam, khususnya pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan menjadi komoditas industri yang memiliki nilai tambah;
- g. Belum berkembangnya kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah;
- h. Masih terbatasnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam terutama pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan sebagai akibat terbatasnya modal, sarana dan prasarana pendukung;
- i. Belum tertatanya infrastruktur perekonomian (jaringan jalan, transportasi, pembangkit dan jaringan listrik, dan air baku) yang menghambat pengembangan usaha;
- j. Terbatasnya kapasitas birokrasi dan aparatur daerah akan menghambat upaya peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan daerah;
- k. Belum optimalnya penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Malinau akan menghambat pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan;
- l. Belum tertatanya manajemen kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah akan menyebabkan pengelolaan sumber daya daerah menjadi kurang efisien dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- m. Belum adanya manajemen pengembangan kecamatan yang terpadu dan terukur akan menghambat kemajuan pembangunan daerah;
- n. Belum optimalnya kerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, industri pengolahan dan pariwisata di



Kabupaten Malinau akan menyebabkan kurangnya daya tarik dan daya saing daerah.

(3) Identifikasi dan Analisis Peluang Kabupaten Malinau

Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar nasional dan pasar internasional secara lebih terbuka dan cepat memberi peluang bagi masa depan Kabupaten Malinau, yaitu :

- a. Perluasan jaringan transportasi akan meningkatkan mobilitas penduduk dan barang dari dan ke Kabupaten Malinau;
- b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kabupaten Malinau;
- c. Perluasan jaringan dan kerjasama internasional baik Masyarakat Ekonomi ASEAN, kerjasama APEC dan kerjasama internasional lainnya akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparat Pemerintah Kabupaten Malinau;
- d. Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi dan produksi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, pariwisata dan perdagangan dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Malinau;
- e. Perluasan jaringan dan kerjasama investasi, perdagangan dan pariwisata nasional dan internasional berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi pengembangan pertanian, perikanan, perkebunan, industri pengolahan dan pariwisata Kabupaten Malinau baik wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata kuliner; perluasan kesempatan kerja; peningkatan pendapatan; dan perluasan jaringan sosial budaya masyarakat.

Demokratisasi yang ditandai oleh perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan mengutamakan aspirasi dan partisipasi rakyat memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten



Malinau untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, yaitu :

- a. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat akan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan adil dengan mempertimbangkan pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya;
- b. Proses perumusan kebijakan dan pengelolaan sumber daya dan aset daerah akan didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan gender, keistimewaan, kekhususan dan keragaman masyarakat;
- c. Proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan; serta pengendalian dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mengutamakan partisipasi masyarakat sehingga mendorong pengembangan potensi dan peningkatan mutu hidup masyarakat, dan terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, aman, nyaman, bermutu dan bermartabat.

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau mempunyai kewenangan dan sumber daya yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu :

- a. Perluasan kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan percepatan kemajuan daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten Malinau akan dapat menjalankan fungsi secara optimal dan motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, maju, cepat, mudah, terjangkau dan bermutu;
- c. Pemerintah Kabupaten Malinau dapat mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Malinau;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan daerah akan memperhitungkan



penghormatan, perlindungan dan penghargaan terhadap nilai-nilai sosial budaya daerah, kearifan lokal, kekhususan dan keragaman masyarakat.

(4) Identifikasi dan Analisis Ancaman Daerah

Globalisasi membawa dampak negatif yang dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Malinau, yaitu :

- a. Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan Kabupaten Malinau akan mendorong pemanfaatan lahan dan wilayah secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kerusakan lingkungan dan menghambat kesinambungan pembangunan;
- b. Perdagangan yang terus meningkat mendorong arus masuk barang dari luar baik dari kabupaten/kota lain maupun dari negara lain secara lebih cepat dan lebih banyak dan selanjutnya akan mendominasi pasar lokal di Kabupaten Malinau yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha di Kabupaten Malinau;
- c. Krisis pangan, krisis ekonomi, krisis energi dan menurunnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, meningkatkan angka kriminalitas, dan menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Malinau.

Demokratisasi memerlukan proses pendidikan politik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Ketidaksiapan dalam melaksanakan demokrasi kemungkinan membawa perubahan yang tidak diharapkan bagi rakyat Kabupaten Malinau, yaitu :

- a. Praktik demokrasi secara partisipatif dan konsultatif antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Malinau dengan masyarakat sipil seringkali memerlukan waktu yang panjang, berulang dan tidak pasti sehingga berdampak pada kelambanan dalam pengambilan keputusan dan keterlambatan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan;



- b. Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami secara sempit sebagai kebebasan tanpa batas dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan merusak sehingga akan mengganggu ketertiban dan kenyamanan kehidupan masyarakat di Kabupaten Malinau;
- c. Tata kelola politik yang cenderung rumit, adanya dominasi elit dan terjadinya konflik menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan rakyat di Kabupaten Malinau.

Desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat mengganggu efektifitas, kelancaran dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah seringkali tidak konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Malinau;
- b. Persaingan antar daerah dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan aset daerah; penetapan daerah perbatasan; serta pengelolaan infrastruktur cenderung meningkat, menimbulkan konflik dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan jangka panjang sehingga menghambat kemajuan daerah;
- c. Lemahnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan dan penganggaran menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah terutama jalan, transportasi udara dan sungai; kurang efektifnya pelayanan publik; serta kurang optimalnya pengembangan ekonomi;
- d. Meningkatnya kesenjangan antara Kabupaten Malinau dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Utara mendorong migrasi penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Malinau sehingga menyebabkan meningkatnya beban penyediaan prasarana



dan sarana perumahan dan permukiman; pendidikan dan kesehatan; dan tempat usaha.

Dengan memperhatikan permasalahan dan analisis lingkungan strategis eksternal dan internal, isu strategis daerah Kabupaten Malinau dalam lima tahun (2016-2021) mendatang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- a. Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu;
- b. Belum optimalnya kinerja pelayanan pemerintahan terutama di desa dan kecamatan;
- c. Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan;
- d. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan;
- e. Belum tertatanya manajemen aset daerah;
- f. Belum berkembangnya manajemen pengetahuan sebagai pondasi kemajuan daerah.

2. Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia

- a. Belum meratanya akses layanan pendidikan yang bermutu disebabkan antara lain oleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar;
- b. Belum meratanya akses layanan kesehatan yang bermutu sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan, serta kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. Memudarnya penerapan nilai-nilai budaya daerah dalam kehidupan kemasyarakatan;
- d. Belum berkembangnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda dan pemudi;



- e. Rendahnya penguasaan teknologi komunikasi dan informasi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan belum optimalnya sinergi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi.

3. Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah

- a. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- b. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari industri kerajinan dan rumah tangga;
- c. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pariwisata;
- d. Belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- e. Belum tertatanya manajemen dan kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah;
- f. Belum berkembangnya kegiatan penanaman modal dalam mendukung penguatan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah sebagai akibat adanya hambatan status lahan, belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah, dan terbatasnya kerjasama antar daerah;
- g. Belum berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung penguatan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi desa;
- h. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah.

4. Belum tertatanya infrastruktur daerah

- a. Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Malinau;



- b. Belum meratanya pembangunan jalan arteri primer (jalan utama), jalan lingkungan dan arteri sekunder yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan;
- c. Terbatasnya jumlah dan mutu prasarana dan sarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi;
- d. Belum tertatanya jaringan sanitasi dan air bersih.
- e. Terbatasnya transportasi darat, udara, dan sungai terutama dalam menghubungkan antar desa dan antar kecamatan;
- f. Belum adanya keterpaduan sistem transportasi antara darat, sungai dan udara yang menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Malinau;
- g. Terbatasnya jumlah dan mutu sarana prasarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi.

5. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

- a. Kurangnya kerjasama dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam pelestarian lingkungan;
- b. Meningkatnya konflik pemanfaatan lahan;
- c. Menurunnya daya dukung lingkungan;
- d. Belum optimalnya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dini dalam menghadapi potensi bencana alam.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ketentuan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Sistem Pelaporan Kinerja.

Esensi dari sistem Pelaporan Kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Malinau adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian sektor publik di Kabupaten Malinau. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi



manajemen Pemerintahan Kabupaten Malinau untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten dapat diwujudkan melalui implemementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang terencana dan terlaksana baik. Implemementasi sistem Pelaporan Kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang memuat visi, misi dan tujuan/sasaran strategis pemerintah Kabupaten Malinau dan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Malinau yang diperoleh. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan, serta capaian kinerjanya dikomunikasikan kepada *stakeholder* dalam wujud Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau.

Pelaporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu;

1. Pelaporan Kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Malinau untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (KemenPANRB, DPRD dan masyarakat).
2. Pelaporan Kinerja adalah sarana upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Dua fungsi utama Pelaporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Pelaporan Kinerja 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Malinau atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2021.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi menjadikan Pelaporan Kinerja 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Malinau bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Malinau dapat merumuskan strategi



pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten Malinau dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau periode 31 Desember 2021 sebanyak 3.450 orang terdiri dari Pria 1.827 orang dan Wanita 1.625 orang dengan komposisi menurut tingkat golongan yang sesuai pada tabel data sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data ASN Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	I/a Juru Muda	0	0	0
2	I/b Juru Muda Tingkat I	5	1	6
3	I/c Juru	9	0	9
4	I/d Juru Tingkat I	16	5	21
Jumlah Golongan I		30	6	36
5	II/a Pengatur Muda	22	15	37
6	II/b Pengatur Muda Tk.I	87	67	154
7	II/c Pengatur	94	40	134
8	II/d Pengatur Tingkat I	194	174	368
Jumlah Golongan II		397	296	693
9	III/a Penata Muda	340	406	746
10	III/b Penata Muda Tk.I	251	334	585
11	III/c Penata	264	223	487
12	III/d Penata Tingkat I	239	191	430
Jumlah Golongan III		1.094	1.154	2.248
13	IV/a Pembina	187	125	312
14	IV/b Pembina Tingkat I	95	43	138
15	IV/c Pembina Utama Muda	21	1	22
16	IV/d Pembina Utama Madya	1	0	1



17	IV/e/Pembina Utama	0	0	0
Jumlah Golongan IV		304	169	473
TOTAL		1.827	1.625	3.450

Sumber : BKPP Kabupaten Malinau Tahun 2021

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam pelaporan kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sasaran yang bersifat strategis, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, terbatas pada indikator input, output dan outcome. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya berasal dari APBN dan Loan/BLN yang juga dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau, disajikan secara terpisah dan tidak dilakukan pengukuran kinerja untuk masing-masing kegiatan tersebut.

Pelaporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan di masa datang.

Sistematika penyajian Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kabupaten Malinau dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja 2021.

Bab II Perencanaan Kinerja; menjelaskan rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Malinau untuk periode 2016-2021 dan rencana kinerja untuk Tahun 2021.



Bab III Akuntabilitas Kinerja; disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Akuntabilitas keuangan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, termasuk analisis terhadap capaian indikator efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Bab IV Penutup; menjelaskan simpulan menyeluruh dari Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2021 ini dan menguraikan saran-saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode lima tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJM Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Malinau yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati Malinau pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan oleh DPRD Malinau dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.

**A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021**

Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016–2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 7. Oleh karena itu, sebagai tolok ukur pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah tahun 2020 digunakan RPJMD yang telah ditetapkan, yaitu RPJMD Tahun 2016-2021 ditambah dengan APBD Tahun 2021.

RPJMD Malinau sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat pemilihnya, yang akan dicapai dalam periode 2016 - 2021. Tujuan, sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Malinau juga memperhatikan tujuan, sasaran dan program-program pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan jangka menengah tersebut disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumberdaya dan dana, serta hasil-hasil (keluaran dan manfaat) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan manfaat yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran.

RENCANA STRATEGIS**1. VISI**

Dengan memperhatikan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; mempertimbangkan kemajuan pembangunan Kabupaten Malinau yang telah dicapai pada periode 2016-2021; memperhitungkan hasil analisis isu strategis; memperhatikan RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025; mengacu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malinau terpilih untuk masa bakti 2016-2021; mempertimbangkan prioritas



pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019; serta mengutamakan semangat “Gerakan Desa Membangun” dengan bertumpu pada kekuatan rakyat, yaitu “Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat”; maka visi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016–2021 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera
Melalui Gerakan Desa Membangun”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa

- **MAJU** adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan;
- **SEJAHTERA** adalah suatu kondisi Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Malinau secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Malinau terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralitas, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- **Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)** adalah gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan membangun desa untuk mewujudkan Kabupaten



Malinau yang Maju dan Sejahtera, Melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). GERDEMA merupakan paradigma pembangunan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan desa. GERDEMA juga menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

GERDEMA didasarkan pada semboyan atau tekad Malinau Berubah Maju Sejahtera yang mengandung semangat untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malinau bersama-sama berubah dalam meraih kemajuan dan kesejahteraan. Berubah untuk maju dan maju untuk menggapai kesejahteraan. GERDEMA juga berangkat dari kekuatan pemikiran bahwa membangun Malinau itu harus dimulai dari desa. Desa adalah tempat dan komunitas masyarakat Malinau. Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera ditentukan oleh kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa yang maju dan sejahtera adalah wujud nyata dari Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera.

GERDEMA adalah paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau dengan bertumpu pada kekuatan rakyat yaitu, “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada kepercayaan sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan. GERDEMA menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan.

Paradigma GERDEMA juga merupakan pembaharuan dari paradigma pembangunan sebelumnya, sebagai wujud konsistensi penerapan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Desa ditempatkan sebagai suatu daerah otonom. Penetapan GERDEMA sebagai paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau menegaskan dan sekaligus meluruskan cita-cita Otonomi Desa. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 menegaskan sikap yang konsisten dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan pembangunan.



2. M I S I

Berdasarkan visi pembangunan tersebut, misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016- 2021 adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
- (2) Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;
- (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
- (4) Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;
- (5) Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: *“one village one product”* dengan semboyan “Bertani Sehat”;
- (6) Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;
- (7) Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
- (8) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun”;
- (9) Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (10) Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
- (11) Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;



- (12) Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan tersebut, pilar pembangunan dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Penguatan Ekonomi Desa dan Keunggulan Daerah;
4. Ibu Kota Malinau Menjadi Ibu Kota Mandiri;
5. Reformasi Birokrasi Fokus Pada Pelayanan Prima.

Selain itu komitmen daerah dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Revitalisasi Pertanian Untuk Ketahanan Pangan;
2. Ibu Kota Kabupaten Menjadi Kota Mandiri;
3. Malinau Sebagai Tujuan Wisata Nasional dan Internasional;
4. Pengembangan RSUD Kabupaten Malinau sebagai Rumah Sakit Rujukan.

3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

3.1 Tujuan

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Meningkatnya infrastruktur dasar.
4. Meningkatnya perekonomian daerah.
5. Meningkatnya produksi pertanian secara luas.
6. Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri.
7. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA.
9. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
10. Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
11. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata.



12. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan prima.

3.2 Sasaran

1. Meningkatkan mutu pendidikan.
2. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Menurunnya kemiskinan di perdesaan.
4. Meningkatkan partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
5. Meningkatkan infrastruktur daerah baik diperkotaan maupun perdesaan.
6. Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan.
7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan.
8. Meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
9. Terbukanya lapangan pekerjaan.
10. Mengembangkan produk unggulan.
11. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan.
12. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa.
13. Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan.
14. Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA.
15. Meningkatkan kualitas air dan udara.
16. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
17. Meningkatkan kesetaraan gender.
18. Meningkatkan pemberdayaan gender.
19. Meningkatkan kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan.
20. Meningkatkan kunjungan wisatawan.
21. Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah
22. Meningkatkan pelestarian kebudayaan daerah
23. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

**4. INDIKATOR KINERJA****INDIKATOR KINERJA KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2016-2021**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik				
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Meningkatnya mutu pendidikan	Harapan lama sekolah
				Rata-rata lama sekolah
			Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup
				Prevelensi balita stunting

Misi 2 : Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi				
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin
			Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi masyarakat yang aktif dalam musrenbang

Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;				
3	Meningkatnya infrastruktur dasar	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar	Meningkatnya infrastruktur daerah baik diperkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik / mantap
				Persentase desa dengan air bersih yang berkualitas
			Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi

Misi 4: Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat				
---	--	--	--	--



perdagangan;				
4	Meningkatnya perekonomian daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan	Pendapatan perkapita masyarakat
			Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks gini

Misi 5 : Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”;				
5	Meningkatnya produksi pertanian secara luas	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran
			Mengembangkan produk unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan

Misi 6 : Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;				
6	Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya nilai tambahan dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan industri

Misi 7 : Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;				
7	Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	Persentase konflik SARA yang diselesaikan	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio Tempat Ibadah per Penduduk
			Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase konflik antar suku, agama dan ras

Misi 8 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi				
---	--	--	--	--



dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;				
8	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas air dan udara.	Indeks kualitas air
				Indeks kualitas udara (ISPU)

Misi 9 : Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);				
9	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan keuangan daerah (Opini BPK)
				Nilai saki
				Nilai LPPD

Misi 10 : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;				
10	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender
			Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender
			Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif

Misi 11 : Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;				
11	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya kunjungan Wisatawan	Jumlah wisatawan
			Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif
			Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Kebudayaan



Misi 12 : Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat;				
12	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan. Strategi, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021 menekankan pada perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan politik dengan menyempurnakan dan mempertajam pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) yang didukung dengan pelaksanaan tiga program unggulan serta program prioritas lainnya.

Selain itu strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Berikut diuraikan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Malinau dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Sejalan dengan arahan RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025, pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dibagi dalam tahapan arah kebijakan pembangunan dengan prioritas pada penguatan landasan pembangunan, penegasan pengembangan dan pemanfaatan momentum pembangunan, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut tahapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021 :

➤ 2016

Menyiapkan landasan bagi percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Kabupaten Malinau.



➤ **2017**

Memperkuat landasan bagi percepatan (akselerasi) dan Pembaharuan (Transformasi) pembangunan Kabupaten Malinau.

➤ **2018**

Memperkuat dan memantapkan percepatan (akselerasi) dan Pembaharuan (transformasi) Pembangunan Kabupaten Malinau terutama peningkatan penyediaan infrastruktur, dan Pengembangan UMKM.

➤ **2019**

Memantapkan percepatan (akselerasi) dan perubahan (transformasi) pembangunan berbasis industri pengolahan hasil perikanan dan pertanian di Kabupaten Malinau; serta peningkatan mutu pariwisata.

➤ **2020**

Pemantapan percepatan (akselerasi) dan perubahan (transformasi) sebagai bagian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau.

➤ **2021**

Mewujudkan Malinau yang maju dan sejahtera secara nyata sebagai bagian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau.

6. PROGRAM

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program utama dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2016-2021, maka kebijakan umum dikaitkan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

(1) Prioritas 1: RT BERSIH

- a. Program RT BERSIH merupakan program unggulan yang menjadi bagian dari penajaman dan perluasan pelaksanaan GERDEMA untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kemajuan desa. Program RT-BERSIH adalah pembangunan berbasis RT (Rukun Tetangga) yang meletakkan tempat (*locus*) pembangunan di tingkat RT;
- b. Program RT-BERSIH menempatkan warga RT sebagai pelaku utama yang aktif dan bertanggung jawab penuh dalam mengelola sumber



daya di tingkat RT dan mengembangkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Ketua dan pengurus RT bersama warga setempat yang merupakan unit komunitas terkecil (*grass root*) sebagai basis dan sekaligus pelaku utama pembangunan yang terlibat langsung dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara bersama;

c. Program ini dilaksanakan dengan menyediakan Dana RT BERSIH sekurang-kurangnya sebesar Rp.260 juta setiap tahun untuk setiap RT, dengan rincian Dana Tunjangan dan Operasional kepada RT sekurang-kurangnya Rp. 60 juta per tahun; dan Dana Program RT BERSIH sekurang-kurangnya sebesar Rp. 200 juta per tahun.

- (2) Prioritas 2: Wajib Belajar Enam Belas Tahun dengan Bebas SPP dan bebas pungutan biaya pendidikan dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
- (3) Prioritas 3: Beras Daerah (RASDA) bagi kepentingan konsumsi rakyat Malinau dan kebijakan subsidi beras sejahtera kepada masyarakat yang tidak mampu melalui kebijakan RASDA yang diperoleh dari produksi petani Malinau;
- (4) Prioritas 4: Optimalisasi Kualitas SDM aparatur pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa secara murni;
- (5) Prioritas 5: Optimalisasi Dana Operasional Kecamatan, dan Dana Gerdema kepada dusun dan RT;
- (6) Prioritas 6: Peningkatan pemberian modal usaha tanpa jaminan dan bunga kepada kelompok usaha ekonomi lemah yang ada di desa, RT dan dusun;
- (7) Prioritas 7: Penyediaan Beasiswa kepada anak-anak Malinau yang tidak mampu dan berprestasi untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- (8) Prioritas 8: Pelaksanaan Tugas Belajar bagi anak yang berprestasi untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi kejuruan;
- (9) Prioritas 9: Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) bagi anak-anak yang putus sekolah dan bagi mereka yang ingin memperoleh keterampilan tertentu;



- (10) Prioritas 10: Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Gratis (Jamkesda) terutama masyarakat yang tidak mampu;
- (11) Prioritas 11: Pembangunan Infrastruktur Kota Mandiri bagi Ibukota Malinau;
- (12) Prioritas 12: Perbaikan Tingkat Kesejahteraan PNS, Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Adat dan Aparat Adat, Ketua BPB dan Anggota, Ketua LPM dan Anggota.
- (13) Prioritas 13: Peningkatan Mutu Pelayanan pada Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) di setiap Kecamatan;
- (14) Prioritas 14: Pengembangan Resi Gudang di setiap Kecamatan untuk menampung hasil pertanian dalam arti luas;
- (15) Prioritas 15: Peningkatan Partisipasi Swasta dalam berinvestasi dan pengembangan usaha dan pasar dalam daerah, antar daerah, antar pulau dan internasional terhadap produk lokal melalui pemberian insentif dan kemudahan regulasi;
- (16) Prioritas 16: Pengembangan Dana Kredit Usaha Persiapan Pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS).

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Target
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	Tahun	13,29
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,07
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	73,00
		Prevalensi balita stunting	%	19
3	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin	%	7,04
4	Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam musrenbang	%	40,21
5	Meningkatnya infrastruktur daerah baik perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	%	25,04
		Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas	%	100
6	Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi	%	98.1
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan	Pendapatan perkapita masyarakat	Rp	130.147.622
8	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks gini	Nilai	0,296
9	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	%	8,47
10	Mengembangkan produk unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan	%	100



11	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan	%	8,26
12	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan industri	%	18,70
13	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio tempat ibadah per penduduk	Rasio	1:250
14	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase konflik antar suku, agama dan ras	%	0
15	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	Indeks	0<IP<1,0
		Indeks kualitas udara(ISPU)	Indeks	0-50
16	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP
		Nilai Sakip	Nilai	A
		Nilai LPPD	Nilai	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	%	100
18	Meningkatnya Pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	%	85
19	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	95
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	Jumlah	8.000
21	Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	%	100
22	Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (cagar budaya)	%	100
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	Indeks	B

**C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



BUPATI MALINAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. YANSEN TP, M.Si

Jabatan : BUPATI MALINAU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Malinau , 19 Januari 2021

 **BUPATI MALINAU**

Dr. YANSEN TP, M.Si

**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas			
1	Meningkatnya mutu pendidikan	Harapan lama sekolah	13,29
		Rata-rata lama sekolah	9,07
2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	73,00
		Prevalensi balita stunting	19
Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa			
3	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin	7,04
4	Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam musrenbang	40,21
Tujuan 3 : Meningkatnya Infrastruktur Dasar			
5	Meningkatnya infrastruktur daerah baik perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	25,04
		Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas	100
6	Meningkatnya konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi	98,1
Tujuan 4 : Meningkatnya Perekonomian Daerah			
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan	Pendapatan Perkapita masyarakat	130.147.622
8	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks gini	0,296
Tujuan 5 : Meningkatnya produksi pertanian secara luas			
9	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	8,47
10	Mengembangkan produk unggulan	Jumlah desa yang memiliki produk unggulan	100
Tujuan 6 : Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri			
11	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan	8,26
12	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri	Tingkat pertumbuhan industri	18,70



	barang dan jasa		
Tujuan 7 : Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai			
13	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio tempat ibadah per penduduk	1:250
14	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik sara	Persentase konflik antar suku, agama dan ras	0
Tujuan 8 : Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA			
15	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	0<IP<1,0
		Indeks kualitas udara(ISPU)	0-50
Tujuan 9 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel			
16	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan keuangan daerah (Opini BPK)	WTP
		Nilai Sakip	A
		Nilai LPPD	Sangat Tinggi
Tujuan 10 : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan			
17	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	100
18	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	85
19	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	95
Tujuan 11 : meningkatkan kontribusi sektor pariwisata			
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	8.000
21	Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	100
22	Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (cagar budaya)	100
Tujuan 12 : Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan prima			
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	B



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,29	13,28	99,92%
		Rata-Rata Lama Sekolah	9,07	8,95	98,67%
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	73,00	71,49	97,93%
		Prevalensi Balita Stunting	19	11,04	141,89%
3	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin	7,04	7,30	96,30%
4	Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam musrenbang	40,21	37,09	92,24%
5	Meningkatnya infrastruktur daerah baik perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	25,04	45,10	180,11%
		Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas	100	100	100%
6	Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi	100	95,41	95,41%
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan	Pendapatan perkapita masyarakat	130.147.622	143.900.000	110,56%
8	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks Gini	0,296	0,341	84,79%
9	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	8,47	4,14	151,12%
10	Mengembangkan produk unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan	100	100	100%



11	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan	8,26	11,05	133,77%
12	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan industri	18,70	22,72	121,49%
13	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio Tempat Ibadah per Penduduk	1:250	1:290	86,21%
14	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase konflik antar suku, agama dan ras	0	0	100%
15	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	0<IP<1,0	3,39	342,42%
		Indeks kualitas udara (ISPU)	0-50	96,21	192,42%
16	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	100%
		Nilai SAKIP	A	CC	71,42%
		Nilai LPPD	Sangt Tinggi		
17	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	100	74,46	74,46%
18	Meningkatnya Pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	85	74,82	88,03%
19	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	95	97	102,10%
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	8.000	15.811	197,63%
21	Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	100	100	100%
22	Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian	100	0	0%



		Pendidikan dan Kebudayaan (Cagar Budaya)			
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malinau didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Perolehan capaian indikator sasaran terhadap 23 sasaran selama tahun 2021 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian sangat rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Melalui Upaya Penyediaan Tenaga Kerja Terampil Dan Terdidik

Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas melalui 2 Sasaran dengan 4 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari

setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel. 3.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Mutu Pendidikan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,29	13,28	99,92%
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,07	8,95	98,67%

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Dari Tabel 3.1 di atas, dapat dilihat perbandingan harapan lama sekolah dengan realisasi tahun 2021 adalah 13,28% dengan target RPJMD tahun 2021 sebesar 13,29% dan capaian kinerja untuk tahun 2021 adalah 99,92%. Hal tersebut menunjukkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dalam bentuk lamanya pendidikan (tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,28	12,89	13,18	13,28	97,06%	99,24%	100%

Perhitungan Harapan Lama Sekolah dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia tertentu yang sekolah pada tahun tertentu, jumlah penduduk usia tertentu pada tahun tertentu, usia dan adanya faktor koreksi. Adapun target harapan lama



sekolah Kabupaten Malinau tahun 2021 sebesar 13,29 dan realisasi harapan lama sekolah 13,28 itu artinya penduduk Kabupaten Malinau dapat menamatkan pendidikan selama 13,28 Tahun atau sampai lulus jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan berkuliah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) Bulan. Angka tersebut jika dibanding dengan angka tahun 2020 sebesar 13,28 maka dapat disimpulkan bahwa angka harapan lama sekolah tahun 2021 tidak mengalami peningkatan dan masih sama dengan tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,28	13,29	99,92%

Perbandingan realisasi kinerja harapan lama sekolah tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi harapan lama sekolah tahun 2021 sebesar 13,28 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 13,29, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2021 capaian kinerjanya sebesar 99,92% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat perbandingan rata-rata lama sekolah dengan target RPJMD 2016-2021 adalah 9,07 dan realisasi untuk tahun 2021 adalah 8,95 sehingga capaian kinerja untuk rata-rata lama sekolah tahun 2021 adalah 98,67%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.3**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,95	8,47	8,65	8,63	94,63%	96,64%	96,42%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2021 sebesar 8,95 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 8,63, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 96,42% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.4**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,95	8,64	103,58%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2021 sebesar 8,95 tahun dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 8,64 tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2021 pencapaiannya sebesar 103,58% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Harapan Lama Sekolah/*Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi Harapan Lama Sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan Harapan Lama Sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung harapan lama sekolah yaitu :

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

dimana:

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

Dari hasil perbandingan harapan lama sekolah dengan target RPJMD 13,29 dan realisasi tahun 2021 adalah 13,28, artinya capaian kinerja untuk tahun 2021 adalah 99,92%. Hal tersebut menunjukkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dalam bentuk lamanya pendidikan (tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Ini berarti, anak-anak yang berusia 7 tahun pada tahun 2021, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,28 tahun atau minimal jenjang Diploma I. Hal ini dapat dilihat dari angka harapan lama sekolah yang mencapai 13,28 tahun ($13,28 \approx 13$ tahun = SD 6 tahun + SMP 3 tahun + SMA 3 tahun + Perguruan Tinggi 1 Tahun).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / *Mean years of schooling* (MYS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Perhitungan rata-rata lama sekolah pada usia 25 tahun keatas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Dalam perhitungan rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Langkah penghitungan rata-rata lama sekolah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan seleksi terhadap penduduk usia 25 tahun keatas
2. Mengelompokkan jenjang pendidikan yang pernah/ sedang diduduki
3. Mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki
4. Mongkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir
5. Menghitung lamanya bersekolah sampai kelas terakhir
6. Menghitung lamanya bersekolah

Untuk menghitung rata-rata lama sekolah digunakan rumus berikut:
Langkah Perhitungan Rata-Rata Lama Sekolah Rumus Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

dimana :

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke- i yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Malinau pada tahun 2021 bergeser keangka 9 tahun. Setiap tahun untuk Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten

Malinau selalu mengalami peningkatan. Pertumbuhan per tahun 1,54 persen, sehingga dapat disimpulkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Malinau semakin baik.

Untuk meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, Pemerintah Kabupaten Malinau melaksanakan program unggulan daerah yaitu Program Wajib Belajar 16 Tahun. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pendidikan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Membangun sekolah mulai dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs sampai ke pelosok desa dan kecamatan, dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun sekolah khususnya PAUD.
- b. Membebaskan pungutan biaya pendidikan dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs.
- c. Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang pendidikan.
- d. Optimalisasi peran serta masyarakat melalui pembentukan Dewan Pendidikan, PGRI dan Komite Sekolah.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk penyediaan buku perpustakaan sekolah, buku paket pelajaran siswa, buku penghubung siswa dengan sekolah dan pendukung lainnya.
- f. Pengadaan tenaga pendidik.
- g. Peningkatan pendidikan, kompetensi dan kualifikasi akademik bagi tenaga pengajar.
- h. Penyediaan layanan transportasi bagi anak sekolah.



- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran strategis daerah dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	99,92%	1. Program Pengelolaan Pendidikan	85,72
	Rata-Rata Lama Sekolah	98,67%	2. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	87,25

Dari tabel di atas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian kinerja Harapan Lama Sekolah 99,92% dan Rata-rata Lama Sekolah mencapai angka 98,67% dengan rata-rata realisasi keuangan 86,48%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja tersebut di atas adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 realisasi anggaran untuk 2 program tersebut di atas adalah Rp. 70.510.545.655,00, sementara target anggaran untuk semua program yaitu Rp 76.284.791.762,00. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran pada kisaran 92,43%. Persentase efisiensi ini dapat diasumsikan pada tahun 2021 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya anggaran.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi guru, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah sehingga guru dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,00	71,49	97,93%
Prevalensi Balita Stunting	%	19	11,04	141.89%

1. Angka Harapan Hidup

Dari Tabel 3.2 di atas dapat dilihat perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Malinau dengan target pada tahun 2021 adalah 73,00, realisasi yang didapat adalah 71,49. Sehingga capaian kinerja untuk tahun 2021 adalah 97,93%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,49	71,3	71,42	71,45	99,73%	99,90%	99,94%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi angka harapan hidup tahun 2021 sebesar 71,49 Tahun dengan realisasi tahun 2020 sebesar 71,45 tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja sebesar 99,94% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,49	73,00	97,93%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi angka harapan hidup tahun 2021 sebesar 71,49 Tahun dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 73 Tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 97,93% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

2. Prevalensi Balita Stunting

Dari Tabel 3.2 di atas, Prevalensi Balita Stunting pada tahun 2021 berhasil ditekan menjadi 11,04% dari target 19% sehingga capaian kinerja tahun 2021 sebesar 141.89% termasuk sangat tinggi.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prevalensi Balita Stunting	%	11,04	32,2	20,2	14,47	78,49%	122,31%	143,25%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi Prevalensi Balita Stunting tahun 2021 sebesar 11,04% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 14,47%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 143,25% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.4**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Prevalensi Balita Stunting	%	11,04	19	141,89%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah realisasi Prevalensi Balita Stunting tahun 2021 sebesar 11,04 % dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 19%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 141.89% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Capaian yang masih rendah dibanding target dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu faktor sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Malinau pada tahun 2021 realisasinya mencapai 71,49 dari target 73,00, dengan capaian kinerja sebesar 97,93%. Capaian kinerja ini termasuk sangat tinggi dan sedikit meningkat dari tahun 2020 yaitu 71,45 dan terus mengalami perbaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Namun jika dibanding AHH Kalimantan Utara tahun 2021 sebesar 72,69 ataupun tingkat Nasional tahun 2021 sebesar 71,57, AHH di Kabupaten Malinau sedikit lebih rendah.

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Malinau, Pemerintah telah mengupayakan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dengan penempatan tenaga kesehatan strategis (dokter, bidan, perawat, analis, sanitarian, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian) baik PTT daerah maupun tenaga Nusantara Sehat di Puskesmas terpencil dan pustu, penyediaan sarana prasarana, obat-obatan dan alat

kesehatan, serta kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta GERMAS. Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan anggaran yang memadai, terutama anggaran rujukan kasus Ibu dan bayi;
- 2) Kerjasama dengan maskapai penerbangan MAF (*Mission Aviation Fellowship*) sebagai transportasi rujukan gawat darurat;
- 3) Dukungan dan kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas sektor;
- 4) Perubahan perilaku masyarakat seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan dengan adanya kemudahan akses terhadap informasi kesehatan;
- 5) Dukungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam penempatan tenaga kesehatan di daerah terpencil.
- 6) Strategi pelayanan kesehatan pada kondisi pandemi Covid-19 oleh Puskesmas cukup optimal.
- 7) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS Pratama, yaitu dengan penilaian oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2017 - 2019 yaitu : 1 RS Pratama terakreditasi Dasar dan semua Puskesmas sudah terakreditasi dengan rincian terakreditasi Utama 1 Puskesmas, Madya 7 Puskesmas, Dasar 8 Puskesmas.



Penyebab kegagalan atau penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Transportasi sulit di daerah terpencil dan sangat terpencil;
- 2) Belum semua desa memiliki tenaga kesehatan tetap terutama daerah terpencil/sangat terpencil;
- 3) Pandemi COVID-19, membatasi aktifitas masyarakat untuk berkumpul dan keluar rumah kecuali kebutuhan mendesak, sehingga cakupan pelayanan di fasilitas kesehatan dan posyandu tidak maksimal.
- 4) Sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan belum maksimal.



Alternative solusi yang dilakukan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau atas keberhasilan/peningkatan kinerja ataupun kegagalan/penurunan kinerja sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kerjasama lintas sektor dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat;
- 2) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan di daerah terpencil;
- 3) Pembinaan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara berkala;
- 4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program kesehatan;
- 5) Menjamin ketersediaan transportasi rujukan pada daerah akses transportasi sulit;
- 6) Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- 7) Peningkatan upaya promosi kesehatan;
- 8) Meningkatkan perilaku CERDIK (Cek kesehatan teratur, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet seimbang, Istirahat cukup, Kelola stress).

Dari Tabel 3.2 di atas, Prevalensi Balita Stunting pada tahun 2021 berhasil ditekan menjadi 11,04% dari target 19% sehingga capaian sebesar 141,89% termasuk sangat tinggi. Dibanding tahun 2020 capaian lebih rendah yaitu sebesar 14,47%. Prevalensi Balita Stunting tahun 2020 di Kalimantan Utara 27,6% dan Nasional sebesar 27,3% (Data SSGBI 2019).

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung prevalensi balita stunting yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah balita stunting}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$$

Realisasi Prevalensi Balita Stunting pada tahun 2021 yaitu 11,04%, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 19%. Prevalensi balita stunting pada tahun 2021 lebih rendah dari prevalensi balita stunting pada tahun 2020 yaitu 14,47%. Hal ini menandakan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kabupaten Malinau dalam pencegahan dan penanganan stunting sudah berhasil. Keberhasilan ini dikarenakan integrasi dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB beserta tim pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Malinau yang mencakup beberapa OPD yang terlibat didalamnya seperti Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, DP3AS dan PKK. Selain itu ditunjang

oleh dukungan Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non Fisik.



b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	REALISASI (%)
Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	97,93	1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah	95,77
	Prevalensi Balita Stunting	141,89	2. Program pemenuhan Upaya Kesehatan dan upaya kesehatan Masyarakat	86,67
			3. Program Peningkatan kapasitas	91,76



			sumber daya manusia kesehatan	
			4. Program sediaan farmasi alat dan makanan minuman	61,70
			5. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	50,13
			6. Program pembinaan keluarga berencana	52,88
			7. Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	54,16

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi keuangan pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) program tergolong rendah, sehingga rata-rata realisasi keuangan sebesar 70,44% dengan rata-rata capaian kinerja indikator 119,91%. Terlihat bahwa pencapaian target indikator kinerja didukung oleh program yang cukup memadai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, walaupun beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana dengan maksimal, dan penundaan beberapa kegiatan dengan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

Hasil pengukuran kinerja ini akan menjadi bahan evaluasi dan analisis kinerja atas keberhasilan dan kegagalan suatu program dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau serta dianalisa penyebab tercapai atau tidaknya. Hal ini dilakukan agar pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran mudah untuk diformulasikan dalam program dan kegiatan.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni 1. efektivitas dan efisiensi penggunaan



sumber daya manusia dan 2. efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya. Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 211.036.069.617,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 233.038.463.277,00. Dengan rumus efisiensi diatas diperoleh persentase efisiensi anggaran pada kisaran 50,13% - 95,77%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan pada tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya anggaran. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan dalam program seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 95,77%, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 91,76% dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upayan Kesehatan Masyarakat sebesar 86,67%.

Upaya efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi ASN Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Puskesmas dan RS pratama, karena pegawai yang lebih terampil dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien. Selain itu, pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 (tiga) dalam pelaksanaan kegiatan, melibatkan tenaga ahli sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan dalam melaksanakan kegiatan.

Misi 2 : Meningkatkan Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Pengukuran Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui 2 Sasaran dengan 2 Indikator Kinerja Sasaran. Dalam proses



implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase Penduduk Miskin	%	7,04	7,3	96,59%

Dari Tabel 3.3 di atas, persentase penduduk miskin pada tahun 2021 adalah 7,3% dari target 7,04%, dengan capaian kinerja sebesar 96,59%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Penduduk Miskin	%	7,3	7,68	6,96	6,63	94,79%	104,65%	109,17%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi persentase penduduk miskin tahun 2021 sebesar 7,3% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 6,63%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 109,17% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Persentase Penduduk Miskin	%	7,3	6,43	88,08%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi persentase penduduk miskin tahun 2021 sebesar 7,30% dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 6,43%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 88,08% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan kompleks yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang harus dihadapi oleh sebagian negara di dunia terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak sesuai dengan standar tertentu yang digunakan sehingga dikategorikan miskin. Oleh karena itu, kemajuan dan keberhasilan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi diantaranya akan tercermin dari keberhasilan program pemerintahan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Standar yang digunakan untuk menentukan apakah seorang penduduk termasuk sebagai penduduk miskin atau bukan adalah garis kemiskinan. BPS menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Pada tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa target persentase penduduk miskin pada tahun 2021 yaitu 7,04% dan terealisasi 7,30%. Dari realisasi ini menunjukkan bahwa ada penambahan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 bertambah 230 jiwa dan secara persentase bertambah 0,67 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020.



Gambar persentase Penduduk Miskin

Walaupun pada tahun ini persentase kemiskinan Kabupten Malinau mengalami peningkatan, tetapi untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Malinau pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Adapun langkah-langkah atau solusi yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskin di Kabupaten Malinau yaitu :

1. Adanya dana desa yang dikelola oleh desa dan dana RT Bersih yang dikelola oleh RT untuk meningkatkan infrastruktur dasar pedesaan yang memberi dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Malinau.
2. Adanya Program Unggulan Beras Daerah dengan memberikan bantuan pangan untuk keluarga miskin,
3. Adanya Program Wajib Belajar 16 tahun dengan menyediakan beasiswa kepada anak-anak malinau yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
4. Meningkatkan integrasi program penanggulangan kemiskinan,
5. Memberikan bantuan sosial dan bantuan kesehatan untuk keluarga miskin.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan

dari program tersebut. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan program tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan	Persentase Penduduk Miskin	96,59	1. Program Pemberdayaan sosial	99,97
			2. Program Rehabilitasi sosial	92,52
			3. Program Perlindungan dan jaminan sosial	94,27

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian kinerja persentase penduduk miskin mencapai angka 96,59% dengan rata-rata realisasi keuangan 95,58%. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut di atas adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS, Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Bantuan dan Jaminan Sosial, Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Semua program tersebut telah memberikan dampak yang baik untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan perekonomian rakyat. Hasil pengukuran kinerja ini juga menjadi bahan evaluasi dan analisis kinerja atas keberhasilan dan kegagalan terhadap pencapaian sasaran strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2021 dengan rumus efisiensi dapat diperoleh persentase efisiensi anggaran 95,58%. Persentase efisiensi ini dapat diasumsikan pada tahun 2021 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya anggaran.

Tabel 3.4

**Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Partisipatif Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	7	8	9
Tingkat Partisipasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Musrenbang	%	40,21	37,09	92,24%

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021, yang disajikan pada tabel di atas, data menunjukkan indikator tingkat partisipasi masyarakat yang aktif dalam musrenbang di Kabupaten Malinau pada tahun 2021 terealisasi sebesar 37,09%, sedangkan targetnya sebesar 40,21%. Persentase tingkat partisipasi masyarakat yang aktif dalam musrenbang memiliki capaian sebesar 92,24%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang aktif dalam musrenbang di Kabupaten Malinau masih berjalan cukup baik.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tingkat Partisipasi Masyarakat Yang Aktif	%	37,09	36,73	36,44	44,58	99,02%	98,24%	120,19%



Dalam Musrenbang								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi tingkat partisipasi masyarakat yang aktif dalam musrenbang tahun 2021 sebesar 37,09% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 44,58%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 120,19% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4.2**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Tingkat Partisipasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Musrenbang	%	37,09	40,21	92,24%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi tingkat partisipasi masyarakat yang aktif dalam musrenbang tahun 2021 sebesar 37,09% dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 40,21%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 92,24% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau. Melalui musrenbang rancangan dokumen pembangunan daerah RKPD dibahas untuk memperoleh tanggapan, penajaman dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang dan pada akhir acara ini akan disepakati dan menjadi acuan penyusunan rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah.



Dalam menyelenggarakan pembangunan desa, desa mendayagunakan lembaga-lembaga seperti pemerintahan desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama antar desa dan badan usaha milik desa untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kegiatan musrenbang desa pada tahun 2021 telah terlaksana dengan baik yakni telah dilaksanakan di 109 desa se-Kabupaten Malinau. Walaupun di tahun 2021 terjadi Pandemi Covid-19 akan tetapi semua dapat terlaksana dan mencapai target yang baik, yang walaupun tingkat partisipasi masyarakat yang hadir tidak memenuhi jumlah target yang diundang, hal ini dikarenakan wabah pandemi covid-19 masih belum rendah yang walaupun ketidakhadiran masyarakat tidak mengurangi makna dan kualitas dari musrenbangdes itu sendiri. Pada tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2021 target dari tingkat partisipasi masyarakat yang aktif dalam musrenbang desa adalah 44,21% dan terealisasi 37,09% sehingga capaian kinerja untuk tahun 2021 adalah 92,24%.

Kondisi covid-19 yang masih tinggi di Kabupaten Malinau saat pelaksanaan kegiatan musrenbangdes, sehingga membatasi ruang gerak tim dari DPMD dalam melakukan sosialisasi terkait regulasi penggunaan Dana Desa dan memberikan pendampingan terhadap kegiatan prioritas yang diusulkan, baik pra musrenbang desa dan pemantauan saat pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan musrenbang desa berlangsung sesuai tahapan dan jadwal kegiatan musrenbang di setiap desa yang telah disusun serta dalam pelaksanaannya didampingi oleh tim Musrenbang Desa Kabupaten. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang desa, Pemerintah daerah selalu menekankan agar tercipta harmonisasi hubungan kelembagaan antara pemerintah desa, BPD dan LPM sehingga partisipasi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan musrenbang desa telah dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat antara lain Karang Taruna, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.

Dari kendala diatas adapun solusi yang ditempuh oleh tim adalah memberi arahan kepada tim tingkat desa dan kecamatan melalui komunikasi lewat telekomunikasi dan menerima pelayanan tatap muka pada saat jam kerja maupun diluar jam kerja serta menyediakan juknis pelaksanaan kegiatan

muserenbagdes tersebut dengan menyampaikan kepada 15 kecamatan dan akan diteruskan ke 109 desa yang tersebar di wilayah kecamatannya masing-masing.



- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Partisipatif Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Aktif Terlibat dalam Musrenbang	92,24	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	44,14

Dari tabel di atas, pada tahun 2021 capaian indikator kinerja tingkat partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam musrenbang mencapai angka



92,24% dengan realisasi keuangan sebesar 44,14%. Hal ini menunjukkan indikator kinerja telah berjalan dengan baik. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa serta sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa. Hasil pengukuran kinerja ini juga menjadi bahan evaluasi dan analisis kinerja atas keberhasilan dan kegagalan terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program yang terkait kegiatan pelaksanaan musrenbang desa adalah Rp. 44.139.000,00, sementara target biaya untuk program tersebut yang didukung sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yaitu Rp 100.00.000,00. Dengan rumus efisiensi diatas diperoleh persentase efisiensi anggaran 44,14%.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalam maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu : jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;

Tujuan : Meningkatnya infrastruktur dasar

Pengukuran Tujuan Meningkatnya infrastruktur dasar daerah melalui 2 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Infrastruktur Daerah Baik Di perkotaan Maupun Perdesaan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap	%	25,04%	45,10%	180,11%
Persentase Desa Dengan Air Bersih Yang Berkualitas	%	100%	100%	100%

1. Persentase Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap

Pada tabel di atas pencapaian sasaran meningkatnya infrastruktur daerah baik di perkotaan maupun di perdesaan dengan indikator persentase jalan dalam kondisi baik atau mantap untuk tahun 2021 ditargetkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 adalah 25,04%. Pada tahun 2021 realisasi dari persentase jalan dalam keadaan baik/mantap mencapai 45,10% dengan capaian kinerja sebesar 180,11% dari target dimana terdapat deviasi lebih sebesar 26%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase jalan dalam kondisi baik atau mantap yaitu :

$$\frac{\text{panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap	%	45,10	49,82	49,68	49,70	110,46%	110,15%	110,19%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi persentase jalan dalam kondisi baik/mantap tahun 2021 sebesar 45,10% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 49,7%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 110,19% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap	%	45,10	25,04	180,11%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi persentase jalan dalam kondisi baik/mantap tahun 2021 sebesar 45,10% dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 25,04%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 180,11% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Pada tahun 2021 realisasi dari persentase jalan dalam keadaan baik/mantap mencapai 45,10% dengan capaian kinerja sebesar 180,11% dari target 25,04%.

Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman



(DPUPRPerkim) melebihi target yang telah ditentukan karena ada beberapa upaya percepatan yang dilakukan mulai dari penyusunan program hingga pelaksanaan yaitu:

- a. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders.
- b. Dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat yakni APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik reguler maupun penugasan.
- c. Penyiapan dokumen *readiness criteria* (dokumen perencanaan teknis, DED, RAB yang dilakukan pada tahun sebelumnya).
- d. Komitmen dan penekanan pimpinan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPerkim) untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing PPK/PPTK.
- e. Dukungan penggunaan sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dapat membantu pokja dalam pelaksanaan proses pelelangan.
- f. Dukungan sistem *e-Monitoring Online* yang sangat membantu dan mendukung pemantauan progres pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- g. Adanya penambahan kendaraan dan alat berat yang sesuai guna mempermudah pekerjaan di lapangan.

Namun jika melihat perbandingan realisasi capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, tampak bahwa kinerja pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020, 2019 maupun 2018. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemeliharaan jalan untuk wilayah perbatasan pedalaman, sementara pemeliharaan jalan yang dilakukan pada tahun 2021 hanya di daerah perkotaan. Hal tersebut bukan karena tidak ada perencanaan pemeliharaan jalan untuk daerah perbatasan pedalaman melainkan karena adanya perubahan cuaca yakni curah hujan yang tinggi untuk wilayah tersebut pada tahun 2021 sehingga pada saat pelaksanaan survey kondisi jalan, hasil survey menunjukkan adanya penurunan kondisi dan mempengaruhi angka kondisi jalan mantap pada tahun 2021. Dan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut akan dilakukan perencanaan untuk pemeliharaan jalan di wilayah perbatasan pedalaman pada tahun anggaran berikutnya.



Tabel 3.5.3
Data Status Jalan Kabupaten Malinau

URAIAN	JALAN KABUPATEN			
	2018	2019	2020	2021
PANJANG JALAN BERDASARKAN JENIS PEMUKIMAN (KM)				
a. Aspal	165.03	168.99	167.42	120.07
b. Kerikil	225.95	224.20	231.77	440.67
c. Tanah/Belum Tembus	652.22	650.00	644.01	436.92
d. Lapen Macadam				43.84
e. Rigid Beton				1.70
TOTAL PANJANG JALAN	1043.20	1043.20	1043,20	1043,20
PANJANG JALAN BERDASARKAN KONDISI JALAN (KM)				
a. Baik	68.06	72.02	79.14	111.36
b. Sedang	451.74	446.26	439.50	358.61
c. Rusak Ringan	113.84	116.50	108.33	222.18
d. Rusak Berat	409.56	408.43	416.22	351.06
TOTAL PANJANG JALAN	325.32	1043.2	1043.2	1043,2
PANJANG JALAN BERDASARKAN KELAS JALAN (KM)				
a. Kelas III	1043.2	1043.2	1043.2	1043.2
TOTAL PANJANG JALAN	1043.2	1043.2	1043.2	1043.2
PENDANAAN APBD BIDANG JALAN				
a. APBD Kabupaten Malinau	58,827,37 1,287.00	34,510,3 48,960.0 0	25,625,02 1,300	53.665.530. 400
b. DAK Bidang Jalan	17,171,00 0,000.00	42,396,2 61,000.0 0	41,305,63 3,000	23.876.581. 000
TOTAL JUMLAH PENDANAAN	75,998,37 1,278.00	76,906,6 09,960.0 0	66,930,65 4,300	77.542.111. 400

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2021



- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya infrastruktur jalan baik di perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	180	Program penyelenggaraan jalan Kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan b. Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan c. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan d. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan e. Sub Kegiatan Pemeliharaan	96.12

			Berkala Jalan	
--	--	--	---------------	--

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh beberapa program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap mencapai angka 180%. Adapun program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Penyelenggaraan Jalan melalui kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan sumber pendanaan dari APBD dan DAK. Pelaksanaan 1 kegiatan dengan 5 Sub Kegiatan tersebut telah meningkatkan kondisi jalan baik sepanjang 10.41 Km sehingga persentase kondisi jalan mantap mencapai 45.10%.



c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain :

- Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Bina Marga, UPTD dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S3 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

- Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran



Gambar 3.5.1 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan diagram di atas, tampak bahwa rencana pagu anggaran pada Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan rencana pagu anggaran Tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya rasionalisasi sebagai dampak dari Covid-19 sehingga terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 10.072.934.016 yakni dari pagu Rp 49.726.184.950 menjadi Rp 39.653.250.934 atau sekitar 20%. Sedangkan untuk realisasi tahun 2021 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini terjadi dikarenakan satuan kerja yang bersangkutan telah mendapatkan penawaran harga lelang lebih tinggi dari yang diperkirakan sehingga masih terdapat sisa anggaran dari sisa lelang yakni dengan nilai sebesar Rp 1.061.171.537.



Gambar 3.5.2 Perbandingan penyerapan anggaran perbulan

Adapun dalam hal penyerapan anggaran, terdapat beberapa hambatan pada semester pertama di tahun 2021, dimana satuan kerja belum sepenuhnya dapat menyerap anggaran kecuali untuk anggaran operasional sampai dengan rasionalisasi anggaran selesai. Disamping itu penetapan APBD Perubahan yang baru selesai pada triwulan empat yakni tepatnya

dibulan Oktober dengan nomenklatur yang baru dan diikuti dengan proses administrasi lanjutan (penetapan SDM pelaksana) telah berimplikasi pada keterlambatan penyerapan anggaran.

Penyerapan anggaran efektif per bulan yaitu terhitung sejak bulan Agustus sampai Desember 2021. Rata-rata penyerapan per bulan pada tahun 2021 tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata penyerapan tahun 2020, hal ini terjadi selain karena keterlambatan dalam penetapan APBD perubahan tetapi adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada salah satu kegiatan karena volume yang sangat besar sehingga waktu pelaksanaan diperpanjang hingga desember dan anggaran dapat diserap pada akhir desember.

2. Persentase Desa dengan Air Bersih yang Berkualitas

Pada tabel 3.5 di atas, pencapaian sasaran meningkatnya infrastruktur daerah baik di perkotaan maupun di perdesaan dengan indikator persentase desa dengan air bersih yang berkualitas untuk tahun 2021 ditargetkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 adalah 100%. Pada tahun 2021 realisasi dari persentase desa dengan air bersih yang berkualitas mencapai 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.5.5

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Desa Dengan Air Bersih Yang Berkualitas	%	100	104	87	90	104%	87%	90%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi persentase desa dengan air bersih yang berkualitas tahun 2021 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 90%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 90% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.6

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Persentase Desa Dengan Air Bersih Yang Berkualitas	%	100	100	100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi persentase desa dengan air bersih yang berkualitas tahun 2021 sebesar 100% dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Target indikator kinerja persentase desa dengan air bersih yang berkualitas pada tahun 2021 adalah 100%. Pada tahun 2021 persentase desa dengan air bersih yang berkualitas yang dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) adalah 100% dan capaian kinerja adalah 100%, dari target 9 desa dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 554 SR. Sedangkan jumlah panjang pipa yang dilaksanakan pada tahun 2021 ialah 1700 M karena jenis pekerjaan yang dilakukan adalah jaringan perpipaan, sementara untuk detail kegiatan akan dijabarkan pada poin b dibawah.

Data tersebut disajikan berdasarkan hasil pengumpulan data dari pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan dan sifatnya bukan



kumulatif terhadap tahun-tahun sebelumnya sehingga menghasilkan data yang hanya berdasarkan tahun anggaran berjalan tersebut yakni tahun 2021, melalui rumus perhitungan yang telah dijabarkan sebelumnya.

Untuk perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya khususnya tahun 2019-2020. Tampak bahwa adanya peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya, yakni perbandingan kinerja tahun 2019 dengan 2021 ada peningkatan kinerja sekitar 13% sedangkan perbandingan kinerja tahun 2020 dengan 2021 ada peningkatan kinerja sekitar 10%, hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja cukup memuaskan dan karena ada beberapa upaya percepatan yang dilakukan mulai dari penyusunan program hingga pelaksanaan yaitu:

- a. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders.
- b. Dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat yakni APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan.
- c. Penyiapan dokumen *readiness criteria* (dokumen perencanaan teknis, DED, RAB yang dilakukan pada tahun sebelumnya).
- d. Komitmen dan penekanan pimpinan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing PPK/PPTK.
- e. Dukungan penggunaan sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dapat membantu pokja dalam pelaksanaan proses pelelangan.
- f. Dukungan sistem *e-Monitoring Online* yang sangat membantu dan mendukung pemantauan progres pelaksanaan kegiatan di lapangan.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5.7
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Terwujudnya akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase desa dengan air bersih yang berkualitas	100	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota a. Sub kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan b. Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	77.84

Dari tabel di atas, tampak bahwa indikator kinerja didukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja Persentase desa dengan air bersih yang berkualitas mencapai angka 100%. Adapun program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan sumber pendanaan dari APBD dan DAK. Pelaksanaan 1 kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan tersebut telah meningkatkan jumlah sambungan rumah sebanyak 554 SR. Berikut tabel pelayanan air bersih melalui kegiatan SPAM.

No	Output	Panjang Pipa (Meter)	Sambungan Rumah*	Jiwa Terlayani**	Proyeksi Penduduk (2020)***
1.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	1700	554	2.770	81.243

Keterangan :

*1 SR = 1 KK

**Asumsi 1 KK = 5 Jiwa

***Data Proyeksi Penduduk, sumber data DUKCAPIL

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain :

- Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S3 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

- Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran



Gambar 3.5.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan diagram di atas, tampak bahwa rencana pagu anggaran pada Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan rencana pagu anggaran Tahun 2020. Berbanding lurus dengan kenaikan pagu anggaran, progres realisasi anggaran Dinas PUPR-PERKIM juga mengalami peningkatan yaitu dari 97,50% menjadi 98,15%.



Gambar 3.5.3 Perbandingan Penyerapan Anggaran

Adapun dalam hal penyerapan anggaran, terdapat beberapa hambatan pada semester pertama di tahun 2021, dimana satuan kerja belum sepenuhnya dapat menyerap anggaran kecuali untuk anggaran operasional dengan nilai yang relatif kecil sampai dengan rasionalisasi anggaran selesai.

Penyerapan anggaran efektif per bulan yaitu terhitung sejak bulan Juli sampai Desember 2021, dengan persentase progres yang masih rendah. Hal ini terjadi karena ada penambahan sub kegiatan baru yakni Pembaharuan RISPAM yang akan dilaksanakan pada semester akhir tahun 2021, namun karena penetapan APBD Perubahan yang baru selesai pada triwulan empat yakni tepatnya dibulan Oktober dengan nomenklatur yang baru dan diikuti dengan proses administrasi lanjutan (penetapan SDM pelaksana) telah berimplikasi pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran untuk indikator air bersih masih kurang efektif.

Berdasarkan hasil analisis untuk kedua indikator tersebut menurut tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas PUPR-PERKIM sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki, di antaranya yaitu:

- 1) Masih terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya berorientasi hasil dan belum dimanfaatkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) di level eselon II dan di bawahnya (SKP);

- 2) Sistem aplikasi pemantauan capaian kinerja anggaran belum secara optimal dimanfaatkan sebagai alat monev secara berkala atas hambatan dan pencapaian target kinerja di dalam PK; dan
- 3) Hasil evaluasi akuntabilitas belum digunakan sepenuhnya untuk perbaikan pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan Dinas PUPR-PERKIM.

Tabel 3.6

**Evaluasi Pencapaian Sasaran 6
Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase Desa yang Terjangkau Komunikasi	%	98,1%	95,41%	97,25%

Target RPJMD tahun 2021 untuk sasaran strategis meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan dengan indikator kinerja persentase desa yang terjangkau komunikasi yang dibebankan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target 98,1% dan hasil realisasinya pada tahun 2021 adalah 95,41% dan capaian kinerja 97,25%, yaitu masih kurang dari target RPJMD yang ditetapkan karena dari 109 desa yang ada dan dapat diakses oleh telekomunikasi seluler, masih terdapat 5 desa yang belum dapat terakses telekomunikasi seluler.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.6.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Desa yang Terjangkau Komunikasi	%	95,41%	92,7	95,41	95,41	97,15%	100%	100%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah perbandingan realisasi persentase desa yang

terjangkau komunikasi tahun 2021 dengan tahun 2018 sebesar 97,15%, realisasi tahun 2019 sebesar 100% dan realisasi tahun 2020 sebesar 100% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Persentase Desa yang Terjangkau Komunikasi	%	95,41	98,1	97,25%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan persentase desa yang terjangkau komunikasi tahun 2021 sebesar 95,41% dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 98,1%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 97,25% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target RPJMD tahun 2021 untuk sasaran strategis meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan dengan indikator kinerja persentase desa yang terjangkau komunikasi yang dibebankan pada Dinas Kominfo dengan target 100% dan hasil realisasinya pada tahun 2021 adalah 95,41% dan capaian kinerja 95,41%, yakni tidak tercapai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase desa yang terjangkau komunikasi yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah desa yang terjangkau komunikasi}}{\text{jumlah keseluruhan desa}} \times 100$$

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Pada tahun 2021 untuk meningkatkan persentase desa yang terjangkau komunikasi, Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target 98,1% dan realisasi 95,41% sehingga capaian kinerja 97,25%, yakni tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya realisasi dari target yang telah ditentukan yaitu:

1. Belum terealisasinya jaringan komunikasi di daerah (desa) tersebut;
2. Infrastruktur jaringan komunikasi seluler belum tersedia, baik yang dikerjakan oleh pusat, provinsi maupun daerah.
3. Kondisi wilayah/desa yang sangat terpencil dengan jumlah penduduk dan juga sangat sedikit.

Disamping beberapa kendala diatas yang mempengaruhi realisasi yang tidak memenuhi target yang ditetapkan tetapi adanya keseriusan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bekerja dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan yaitu mempercepat pembangunan prasarana dan sarana komunikasi dan informasi serta melakukan Koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Provider terkait.

Tabel 3.6.3. Kondisi Akses Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Malinau

NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
1	Mentarang				
		1	Pulau Sapi	4G	Telkomsel (Swasta)
		2	Long Gafid	Sinyal Telkomsel dari Desa Pulau Sapi	
		3	Long Bisai		
		4	Temalang		
		5	Long Liku		
		6	Lidung Kemenci		
		7	Mentarang Baru		
		8	Paking	4G	Telkomsel
		9	Harapan Maju	Sinyal Telkomsel dari Desa Paking	
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia



2	Malinau Kota				
		1	Batu Lidung	3G	Telkomsel, IM3
		2	Malinau Kota	4G	Telkomsel, IM3
		3	Pelita Kanaan	4G	Telkomsel, IM3
		4	Malinau Hulu	4G	Telkomsel, IM3
		5	Malinau Hilir	4G	Telkomsel, IM3
		6	Tanjung Keranjang	3G	Telkomsel, IM3
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
3	Malinau Utara				
		1	Kaliamok	4G	Telkomsel, IM3
		2	Luso	Eg	Telkomsel
		3	Malinau Seberang	4G	Telkomsel, IM3
		4	Putat	Eg	Telkomsel
		5	Salap	Eg	Telkomsel
		6	Seruyung	Blankspot	
		7	Respen Tubu	Eg	Telkomsel, IM3
		8	Belayan	Eg	Telkomsel
		9	Sembuak Warod	Eg	Telkomsel
		10	Lubak Manis	4G	Telkomsel, IM3
		11	Kelapis	3G	Telkomsel
		12	Semengaris	4G	Telkomsel, IM3
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
4	Malinau Barat				
		1	Long Bila	Sinyal Telkomsel dari Desa Setulang	
		2	Long Kenipe		
		3	Sentaban		
		4	Punan Bengalun	4G	Telkomsel
		5	Sesua	Eg	Indosat
		6	Tanjung Lapang	4G	Telkomsel, IM3
		7	Taras	4G	Telkomsel
		8	Kuala Lapang	4G	Telkomsel, IM3
		9	Sempayang	3G	Telkomsel
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
5	Malinau Selatan				
		1	Bila Bekayuk	4G	Indosat
		2	Long Loreh	Eg	Telkomsel
		3	Langap	Sinyal Telkomsel dari Desa Long	



				Loreh	
		4	Laban Nyarit	Blankspot	
		5	Nunuk Tanah Kibang	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
		6	Pelencau	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
		7	Paya Seturan	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
		8	Punan Rian	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
		9	Sengayan	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
6	Malinau Selatan Hilir				
		1	Setulang	4G	Telkomsel
		2	Setarap	2G	Telkomsel
		3	Punan Setarap	Sinyal Telkomsel dari Desa Setarap	
		4	Batu Kajang	4g	Indosat
		5	Gong Solok	4g	Indosat
		6	Punan Gong Solok	4g	Indosat
		7	Long Adiu	4g	Indosat
		8	Punan Long Adiu	4g	Indosat
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
7	Malinau Selatan Hulu				
		1	Long Lake	Blankspot	
		2	Punan Mirau	4G	Indosat
		3	Long Rat	Blankspot	
		4	Halanga	Blankspot	
		5	Metut	4G	Indosat
		6	Long Jalan	4G	Indosat
		7	Nahakramo	Blankspot	
		8	Tanjung Nanga	4G	Telkomsel
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
8	Mentarang Hulu				
		1	Lung Fala	4G	Telkomsel
		2	Lung Kebinu	4G	Indosat
		3	Lung Mekatip	4G	Indosat
		4	Lung Simau	4G	Indosat



		5	Lung Barang	Eg	Telkomsel
		6	Lung Sulit	4G	Indosat
		7	Lung Semamu	4G	Indosat
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
9	Sungai Tubu				
		1	Long Nyau	4G	Indosat
		2	Long Titi	4G	Indosat
		3	Long Ranau	4G	Indosat
		4	Rian Tubu	4G	Indosat
		5	Long Pada	4G	Telkomsel
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
10	Pujungan				
		1	Long Pujungan	Eg	Telkomsel
		2	Long Ketaman	4G	Telkomsel
		3	Long Pua	4G	Telkomsel
		4	Long Aran	4G	Telkomsel
		5	Long Lame	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Aran	
		6	Long Jelet	4G	Telkomsel
		7	Long Paliran	4G	Telkomsel
		8	Long Bena	4G	Telkomsel
		9	Long Belaka Pitau	4G	Telkomsel
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
11	Kayan Hilir				
		1	Data Dian	Eg	Telkomsel
		2	Long Pipa	4G	Telkomsel
		3	Long Sule	2G	Telkomsel
		4	Sungai Anai	4G	Telkomsel
		5	Long Metun	4G	Telkomsel
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
12	Kayan Hulu				
		1	Long Nawang	Eg	Telkomsel
		2	Nawang Baru	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Nawang	
		3	Long Temuyat		
		4	Long Betaoh	4G	Telkomsel
		5	Long Payau	4G	Telkomsel



NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
13	Sungai Boh				
		1	Mahak Baru	Eg	Telkomsel (Swasta)
		2	Dumu Mahak	Sinyal Telkomsel dari Desa Mahak Baru	
		3	Long Lebusan	4G	Indosat & Telkomsel
		4	Long Top	4G	Indosat
		5	Agung Baru	2G	Telkomsel
		6	Data Baru	Sinyal Telkomsel dari Desa Mahak Baru	
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
14	Kayan Selatan				
		1	Long Ampung	Eg	Telkomsel (Pemda)
		2	Long Uro	4G	Indosat
		3	Lidung Payau	4G	Telkomsel
		4	Sungai Barang	4G	Telkomsel
		5	Metulang	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Ampung	
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
15	Bahau Hulu				
		1	Long Uli	4G	Indosat
		2	Long Alango	Eg	Telkomsel (Pemda)
		3	Long Berini	4G	Telkomsel
		4	Long Tebulo	4G	Indosat
		5	Apau Ping	4G	Telkomsel
		6	Long Kemuat	4G	Indosat

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Malinau Tahun 2021

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program,

capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatkan konektivitas antar kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi	95,41	1. Program aplikasi informatika	98,79
			2. Program informasi dan komunikasi publik	87,93

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja persentase desa yang terjangkau komunikasi mencapai angka 95,41% dengan rata-rata realisasi keuangan 93,36%. Adapun program yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program aplikasi informatika dan Program informasi dan komunikasi publik. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hasil pengukuran kinerja ini juga menjadi bahan evaluasi dan analisis kinerja atas keberhasilan dan kegagalan terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk kedua program yakni program aplikasi informatika dan Program informasi dan komunikasi publik adalah Rp 7.865.144.402. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran 97,75%.

Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;

Tujuan : Meningkatnya perekonomian daerah

Pengukuran Tujuan Meningkatnya perekonomian daerah melalui 2 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpuh pada ekonomi desa dan perkotaan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Pendapatan Perkapita Masyarakat	Rp	130.147.622	143,900,000	110,56%

Untuk pendapatan perkapita masyarakat tahun 2021 dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD adalah Rp. 130.147.622. Realisasi Untuk pendapatan perkapita masyarakat tahun 2021 adalah Rp 143,900,000 dengan capaian yang dicapai untuk tahun 2021 sebesar 110,56%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung pendapatan perkapita masyarakat yaitu:

$$\frac{PDRB(t+1) - PDRB(t)}{PDRB(t)} \times 100\%$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7.1**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pendapatan Perkapita Masyarakat	Rp	143,900,000	107.600.000	96.993.079	119.380.000	74,77%	67,40%	82,96%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi pendapatan perkapita masyarakat tahun 2021 sebesar Rp. 143,900,000 dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 119.380.000.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7.2**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Pendapatan Perkapita Masyarakat	Rp	143,900,000	95.165.610	151,21%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi pendapatan perkapita masyarakat tahun 2021 sebesar Rp. 143,900,000 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar Rp. 95.165.610, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 151,21% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan daerah khususnya di bidang perekonomian. Pertumbuhan



ekonomi dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, yaitu dengan menghilangkan faktor perubahan harga (inflasi) dan menggunakan faktor pengali harga konstan sehingga diperoleh gambaran peningkatan produksi secara makro. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat. Dimana kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu cerminan dari perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran yang nyata dari dampak kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dari berbagai macam sektor ekonomi, dimana laju pertumbuhan suatu daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun. Peningkatan PDRB dapat berdampak langsung terhadap pendapatan perkapita masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita mendorong meningkatnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa.

Struktur perekonomian Kabupaten Malinau pada tahun 2020 masih didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama antara lain pertambangan dan penggalian (50,01 persen), Konstruksi (16,13 persen) dan pertanian, kehutanan dan perikanan (10,93 persen).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau periode 2018-2020 berfluktuasi. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi yaitu 5,78 persen. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Malinau terjadi percepatan sebesar 6,39 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 perekonomian Malinau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,62 persen. Hal ini disebabkan oleh terjadinya wabah pandemi covid-19 sehingga beberapa sektor ekonomi mengalami kontraksi pertumbuhan seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar negatif 3,55 persen, transportasi dan pergudangan sebesar negatif 1,52 persen, dll.

Untuk pendapatan perkapita masyarakat tahun 2021 dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD adalah Rp. 95,165,610, Realisasi Untuk pendapatan perkapita masyarakat tahun 2021 adalah Rp 143,900,000 dengan capaian kinerja untuk tahun 2021 sebesar 151,2%.

Kebijakan daerah untuk mendorong meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat antara lain :

1. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).



2. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa dan kecamatan.
3. Meningkatkan produktivitas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan	Pendapatan perkapita masyarakat	100%	1. Program Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	93,34
			2. Program Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	95,60

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian kinerja pendapatan perkapita masyarakat mencapai 100% dengan rata-rata realisasi keuangan 94,47%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tersebut di atas adalah Program Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Program Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hasil pengukuran kinerja ini juga

menjadi bahan evaluasi dan analisis kinerja atas keberhasilan dan kegagalan terhadap pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Malinau.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program yang terkait capaian kinerja peningkatan pendapatan masyarakat adalah Rp. 248.751.400,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 257.266.246,00. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran 96,69%.

Tabel 3.8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8
Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Indeks Gini	Nilai	0,296	0,341	84,79%

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung indeks gini yaitu:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8.1**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Gini	Nilai	0,341	0,300	0,295	0,300	112%	113%	112%

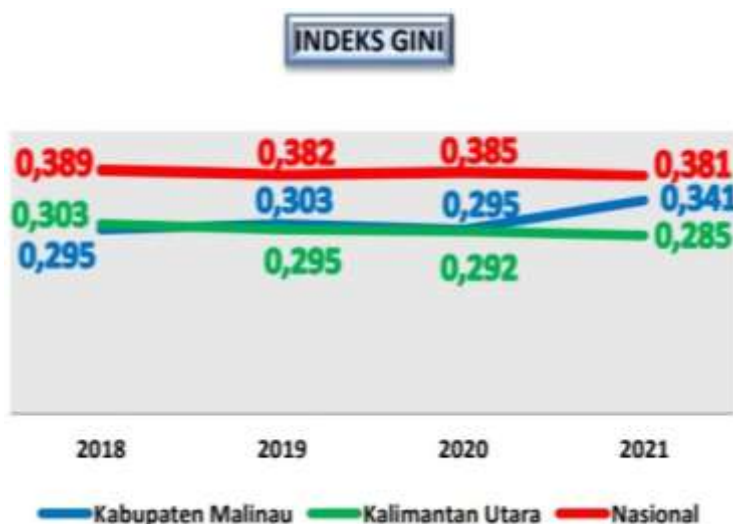
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi indeks gini tahun 2021 sebesar 0,341 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0,300, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 112% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8.2**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Indeks Gini	Nilai	0,341	0,296	84,79%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi indeks gini tahun 2021 sebesar 0,341 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 0,296, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 84,4% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.



Gambar Indeks Gini

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan digunakan pendekatan teori Gini Ratio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 (>0 dan <1). Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

$0,00 < G < 0,35 \rightarrow$ pemerataan tinggi / ketimpangan rendah

$0,35 < G < 0,50 \rightarrow$ pemerataan / ketimpangan sedang

$G > 0,50 \rightarrow$ pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Dari data diatas indeks Gini Kabupaten Malinau tahun 2021 sebesar 0,341. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Malinau berada di level rendah atau pemerataan tinggi.

Misi 5 : Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”;

Tujuan : Meningkatnya Produksi Pertanian Secara Luas

Pengukuran Tujuan **Meningkatnya produksi pertanian secara luas** melalui 2 (dua) Sasaran dengan 2 (dua) Indikator kinerja sasaran. Dalam proses

implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel 3.9
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9
Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Menurunnya Angka Pengangguran	%	8,47	4,14	151,12%

Berdasarkan Tabel di atas, kinerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2021 terkait sasaran terbukanya lapangan pekerjaan dengan indikator kinerja menurunnya angka pengangguran dari target 8,47% dan terealisasi 4,14%. Berarti untuk tahun 2021 capaian kinerjanya sebesar 151,12%. Capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2021 yaitu 151,12%, berarti ada penurunan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung menurunnya angka pengangguran yaitu:

$$\text{Tingkat pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yg menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2020 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya Angka Pengangguran	%	4,14	6,77	4,13	5,08	163,52%	99,75%	122,70%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi menurunnya angka pengangguran tahun 2021 sebesar 4,14% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 5,08%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 122,70% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Menurunnya Angka Pengangguran	%	4,14	8,47	151,12%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi menurunnya angka pengangguran tahun 2021 sebesar 4,14% dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 8,47%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 151,12% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2021 bahwa sasaran terbukanya lapangan pekerjaan dengan indikator kinerja menurunnya angka pengangguran untuk tahun 2021 capaian kinerjanya sebesar 151,12% dari target 8,47% dan terealisasi 4,14%. Capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2021 yaitu 151,12%, berarti ada peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Data jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 di Kabupaten Malinau adalah 45.659 orang atau sekitar 71,49% persen dari jumlah penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 71,49%, dengan jumlah

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tersebut menunjukkan besarnya partisipasi angkatan kerja aktif dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Malinau. Dari jumlah 45.659 orang yang merupakan jumlah angkatan kerja terbagi menjadi dua kategori yaitu jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan sebesar 43.770 orang, sedangkan jumlah penduduk yang belum atau tidak memiliki pekerjaan (Pengangguran Terbuka) sebanyak 1.889 orang.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau bahwa tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kegiatan selama satu tahun yang lalu sebesar 1.889 orang atau 4,14% pada tahun 2021.

Tabel 3.9.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kegiatan

Kegiatan Utama	Tahun 2021		
	Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan selama satu minggu yang Tahun Lalu (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + perempuan
1. Angkatan Kerja	29.354	16.305	45.659
1.1. Bekerja	28.265	15.505	43.770
1.2. Pengangguran Terbuka	1.089	800	1.889
2. Bukan Angkatan Kerja	5.261	12.944	18.205
Jumlah	33.877	28.285	62.162
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	84,80	55,75	71,49
Tingkat Pengangguran	3,71	4,91	4,14

Sumber : BPS kabupaten Malinau 2021



Gambar Tingkat Pengangguran Terbuka



Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat atau angka pengangguran di Kabupaten Malinau belum menurun karena;

- a. Dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 membuat banyak usaha/pengusaha, perusahaan dan UMKM tidak dapat membuka lowongan pekerjaan dan bahkan malah mengurangi tenaga kerja atau karyawannya.
- b. Meningkatnya jumlah pencari kerja dimasa pandemi covid-19 berbanding terbalik dengan sektor pemberi kerja yang malah memilih untuk menutup sementara sebagian usaha pekerjaannya demi kelanjutan usaha di masa pandemi covid-19 ini sehingga mempengaruhi angka penyerapan tenaga kerja (pengangguran terbuka).
- c. Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka akibat hilangnya mata pencaharian /pekerjaan atau usaha akibat pandemi covid-19.
- d. Jumlah pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja serta tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya tamatan lembaga-lembaga pendidikan formal.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.9.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Terbukanya Lapangan Pekerjaan	Menurunnya Angka Pengangguran	4,14	1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	100
			2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	99,02

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja menurunnya angka pengangguran mencapai angka 4,14% dengan rata-rata realisasi keuangan 99,51%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program yang terkait pencapaian indikator kinerja menurunnya angka pengangguran adalah Rp. 6.068.139.000, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 6.096.531.000. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran 99,53%.

Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10
Mengembangkan produk unggulan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase Desa yang Memiliki Produk Unggulan	%	100	100	100%



Dari tabel di atas dengan sasaran mengembangkan produk unggulan dengan indikator kinerja persentase desa yang memiliki produk unggulan untuk tahun 2021 capaian kinerja sebesar 100 persen dari target 100 persen dan realisasi 100 persen.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.10.1**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Desa yang Memiliki Produk Unggulan	%	100	27,50	49,90	82,60	27,50	49,90	82,60

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi persentase desa yang memiliki produk unggulan tahun 2021 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 82,6%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 82,60% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.10.2**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Persentase Desa yang Memiliki Produk Unggulan	%	100	100	100%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi persentase desa yang memiliki produk



unggulan tahun 2021 sebesar 100% dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Pada tahun 2021 untuk meningkatkan persentase desa yang memiliki produk unggulan, Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pertanian dengan target 100% telah berhasil merealisasikannya sebesar 100% dan capaian kinerja 100%, yakni memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya realisasi dari target yang telah ditentukan yaitu:

1. Keseriusan Dinas Pertanian dalam bekerja dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.
2. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Petani/Pelaku Usaha.
3. Fokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian.
4. Memaksimalkan anggaran yang tersedia seefisien mungkin.
5. Memberdayakan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Dinas Pertanian untuk memotivasi para petani agar lebih giat bertani, berladang, berternak dan berkebun , sehingga dapat meningkatkan perekonomian petani serta dapat menghasilkan suatu produk unggulan desa.

Sesuai data yang diterima dari Dinas Pertanian bahwa capaian kinerja tahun 2021 dengan indikator persentase desa yang memiliki produk unggulan mencapai target yang ditetapkan di RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 karena :

- Capaian 100 persen dikarenakan target 90 desa dari 109 desa memiliki produk unggulan yang telah dikembangkan.
- Produk unggulan desa yang dikembangkan adalah padi yang merupakan produk unggulan daerah dan program unggulan daerah (Beras Daerah/Rasda).



- Khusus tanaman pangan dalam hal ini pemenuhan Rasda, maka tiap desa yang dimaksud telah berkontribusi untuk menjual gabah kepada PERUSDA INTIMUNG dan beras dari hasil gilingan masyarakat pada pasar tradisional.
- Sembilan puluh (90) desa yang dimaksud di atas tersebar di kecamatan yakni Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Selatan, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Bahau Hulu.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Mengembangkan produk unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan	100	1. Program Pemberdayaan PPL (Kegiatan Pembayaran Honor PPL)	97.61
			2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian (Kegiatan DAK Pertanian)	100
			3. Pengawasan peredaran bahan pakan/benih bibit hijauan pakan	94.01



			ternak 4. penyusunsn masterplan pengembangan prasarana, sarana kawasan, dan komoditas perkebunan	91.91
--	--	--	---	-------

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian kinerja persentase desa yang memiliki produk unggulan adalah 100%, dengan rata-rata realisasi keuangan sebesar 98,76%. Adapun program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Pemberdayaan PPL (Kegiatan Pembayaran Honor PPL), Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian (kegiatan DAK Pertanian), Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Program peningkatan produksi hasil peternakan (Kegiatan peredaran bahan pakan/benih/bibit hijauan pakan ternak IB dan Monitoring).

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program yang terkait kegiatan pencapaian kinerja persentase desa yang memiliki produk unggulan adalah Rp. 4.764.226.300,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 4.823.640.400,00. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran 98,76%.

Misi 6 : Menjadikan ibu kota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;

Tujuan : Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri

Pengukuran Tujuan **Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri** melalui 2 (dua) Sasaran dengan 2 (dua) Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian

kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

1. Sektor Perdagangan

Tabel 3.11
Evaluasi Pencapaian Sasaran 11
Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Tingkat Pertumbuhan Perdagangan	%	8,26 %	11,05 %	133,77 %

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau menetapkan target peningkatan jumlah pedagang sebesar 8,26% dari jumlah pedagang tahun 2020 sebesar 2.072 pedagang. Berdasarkan hasil pendataan di lapangan hingga triwulan IV tahun 2021 terdata sebanyak 2.301 pedagang. Telah terjadi peningkatan sebesar : $2031 - 2072 = 229$ pedagang atau $(2301 - 2072) / 2072 \times 100 \% = (229 / 2072) \times 100 \% = 11,05 \%$. Dari hasil tersebut maka capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar : $(11,05 / 8,26) \times 100 = 133,77\%$. Sehingga capaian kinerja hingga akhir tahun 2021 sebesar 133,77%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.11.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2020 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tingkat Pertumbuhan Perdagangan	%	11,05 %	5,66	8,55	4,33	51,22%	77,37%	39,18%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah perbandingan realisasi tingkat pertumbuhan perdagangan tahun 2021 sebesar 11,05% dengan realisasi tahun 2020 sebesar



4,33%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.11.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Tingkat Pertumbuhan Perdagangan	%	11,05 %	8,26 %	133,77 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 11,05 %. Jumlah ini telah melampaui target RPJMD 2016-2021 sebesar 8,26%. Sehingga capaian kinerja dengan indikator tingkat pertumbuhan perdagangan terhadap target akhir RPJMD sebesar 133,77%. untuk tingkat pertumbuhan perdagangan.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari beberapa tabel perbandingan yang ditampilkan dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 tingkat pertumbuhan perdagangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 karena PANDEMI COVID 19, maka pada tahun 2021 kondisinya telah normal dan sektor perdagangan terutama skala kecil telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini disebabkan karena situasi perekonomian di Kabupaten Malinau yang kondusif dan telah ada pergantian kepemimpinan daerah yang baru yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi kearah yang jelas dan terarah. Gairah masyarakat untuk terjun di sektor ini cukup besar karena peluang yang tersedia sangat terbuka untuk berkembang dan maju. Disamping itu dukungan teknologi digital yang sangat pesat yang sangat mendukung perkembangan usaha para pedagang dalam mempromosikan produk yang mereka jual. Inilah beberapa hal yang menjadi penyebab meningkatnya kinerja di sektor perdagangan.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun oleh OPD tentu tujuannya untuk mendukung tugas pokok dan fungsi OPD tersebut dan target-target kinerja yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan Dinas Perindag dalam mencapai target kinerja untuk tingkat pertumbuhan pada sektor perdagangan. Setiap program yang telah ditetapkan, maka pelaksanaannya di lapangan berupa kegiatan-kegiatan pasti didukung dengan anggaran. Salah satu poin untuk melihat terlaksananya suatu program dan kegiatan adalah tingkat realisasi dari anggarannya. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan	133 %	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %
			- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100 %
			- Program Pengembangan Ekspor	100 %
			- Program Standardisasi Perlindungan Konsumen	100 %
			- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100 %

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian indikator

kinerja dengan tingkat pertumbuhan perdagangan mencapai 133% dengan realisasi keuangan 100%.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Dari tabel diatas dapat diketahui prosentase realisasi anggaran dari berbagai program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target kinerja dari Tingkat Pertumbuhan Perdagangan pada RPJMD 2016-2021 yaitu 100%.

2. Sektor Industri

Tabel 3.12

Evaluasi Pencapaian Sasaran 12
Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Tingkat Pertumbuhan Industri	%	18,70 %	22,72 %	121,49 %

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau menetapkan target peningkatan jumlah industri sebesar 18,70% dari jumlah industri tahun 2020 sebesar 1254 unit usaha. Berarti peningkatan yang diinginkan sebanyak : $1254 \times 18,70 \% = 187$ unit usaha. Namun berdasarkan hasil pendataan di lapangan hingga akhir triwulan IV tahun 2021 terdata sebanyak 1539 unit usaha. Telah terjadi peningkatan sebesar : $1539 - 1254 = 285$ unit usaha atau $(1539 - 1254) / 1254 \times 100 \% = (285 / 1254) \times 100 \% = 22,72 \%$.

Dari hasil perhitungan tersebut maka capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar : $(22,72 / 18,70) \times 100 = 121,49$. Sehingga capaian kinerja hingga akhir tahun 2021 sebesar 121,49 %.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.12.1**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tingkat Pertumbuhan Industri	%	22,72 %	60	44,54	5,28	265,08%	196,03%	23,23%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi tingkat pertumbuhan industri tahun 2021 sebesar 22,72% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 5,28%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 23,23% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.12.2**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Tingkat pertumbuhan industri	%	22,72 %	18,70	121,49%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi tingkat pertumbuhan industri tahun 2021 sebesar 22,72% dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 18,70%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 121,49 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.



- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari beberapa tabel perbandingan yang ditampilkan dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 tingkat pertumbuhan industri telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 karena Pandemi Covid 19, maka pada tahun 2021 kondisi telah normal dan sektor industri telah menunjukkan geliatnya terutama skala kecil dengan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini disebabkan karena situasi perekonomian di Kabupaten Malinau yang kondusif dan telah ada pergantian kepemimpinan daerah yang baru yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi kearah yang jelas dan terarah. Gairah masyarakat untuk terjun di sektor ini cukup besar karena peluang yang tersedia sangat terbuka untuk berkembang dan maju. Disamping itu dukungan teknologi digital yang sangatpesat yang sangat mendukung perkembangan usaha sektor industri dalam mempromosikan produk yang mereka jual. Inilah beberapa hal yang menjadi penyebab meningkatnya kinerja di sektor industri yang mirip dengan sektor perdagangan.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun oleh OPD tentu tujuannya untuk mendukung tugas pokok dan fungsi OPD tersebut serta target-target kinerja yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan Dinas Perindag dalam mencapai target kinerja untuk tingkat pertumbuhan pada sektor industri. Setiap program yang telah ditetapkan, maka pelaksanaannya dilapangan berupa kegiatan-kegiatan pasti didukung dengan anggaran. Salah satu poin untuk melihat terlaksananya suatu program dan kegiatan adalah tingkat realisasi dari anggarannya. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Nilai Tambah dan Pendapatan Dari Sektor Industri	Tingkat Pertumbuhan Industri	121,49 %	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	100 %

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja Tingkat pertumbuhan industri mencapai angka 121,49%, dengan rata-rata realisasi keuangan mencapai 100%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Dari tabel diatas dapat diketahui prosentase realisasi anggaran dari berbagai program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target kinerja dari Tingkat Pertumbuhan Perdagangan pada RPJMD 2016-2021 yaitu 100%. Dari besaran anggaran tersebut penggunaannya tentu diperuntukan membiayai program-program yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran. Hal ini guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Misi 7 : Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;

Tujuan : Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Harmonis, Rukun Dan Damai



Pengukuran Tujuan mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai secara luas melalui 2 (dua) Sasaran dengan 2 (dua) Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel 3.13
Evaluasi Pencapaian Sasaran 13
Meningkatnya Fasilitas Layanan Keagamaan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Rasio Tempat Ibadah per Penduduk	Rasio	1:250	1:290	86,21%

Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan rumah ibadah saat ini adalah 1:290 dari target 1:250 dengan demikian capaian sasaran OPD tahun 2021 adalah 86,21%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.13.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Rasio Tempat Ibadah per Penduduk	Rasio	1:290	1:325	1:201	1:287	112%	69,31%	98,96%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi rasio tempat ibadah per penduduk tahun 2021 sebesar 1:290 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 1:287, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 98,96% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.13.2**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Rasio Tempat Ibadah per Penduduk	Rasio	1:290	1: 250	86,21%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi rasio tempat ibadah per penduduk tahun 2021 sebesar 1:290 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 1:250, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 86,21% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Jumlah rumah ibadah tahun 2021 berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Malinau sebanyak 282 Rumah Ibadah dan jumlah penduduk Kabupaten Malinau pada tahun 2021 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 81.925 jiwa.

Terdapat fasilitas layanan keagamaan di Kabupaten Malinau belum dapat memenuhi target 1: 250 karena:

1. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sedangkan fasilitas layanan keagamaan tidak bertambah.
2. Pesebaran penduduk di sekitar fasilitas layanan keagamaan tidak merata.

Solusi atau perbaikan yang akan datang adalah membutuhkan komitmen yang kuat dari setiap stakeholder baik pemerintah, pemuka agama dan

masyarakat dalam meningkatkan fasilitas layanan keagamaan untuk mewujutkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.13.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio tempat ibadah per penduduk	86,21%	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2020 capaian indikator kinerja rasio tempat ibadah per penduduk mencapai angka 1:290. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Tabel 3.14
Evaluasi Pencapaian Sasaran 14
Terjaganya Keamanan dan Ketertiban dari Konflik SARA

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Persentase Konflik Antar Suku, Agama dan Ras	%	0%	0%	100%



Pada tabel di atas dengan sasaran terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA dengan indikator persentase konflik antar suku, agama dan ras dengan target 0 persen dan terealisasi 0 persen.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase konflik antar suku, agama dan ras yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah konflik sara yang terselesaikan}}{\text{Jumlah konflik sara}} \times 100$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Konflik Antar Suku, Agama dan Ras	%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi persentase konflik antar suku, agama dan ras tahun 2021 sebesar 0% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.2**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Persentase konflik antar suku, agama dan ras	%	0	0	100%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi persentase konflik antar suku, agama dan ras tahun 2021 sebesar 0% dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 0%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tabel di atas dengan sasaran terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA dengan indikator persentase konflik antar suku, agama dan ras dengan target 0 persen dan terealisasi 0 persen. Hal ini dapat terjadi karena adanya kerjasama Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang terdiri dari unsur tokoh-tokoh agama menghasilkan pemahaman masyarakat Kabupaten Malinau yang sangat toleransi antar umat beragama. Disamping itu hubungan kekeluargaan masyarakat di Kabupaten Malinau sangat tinggi, sehingga dengan demikian terciptalah kehidupan yang harmonis, aman, dan damai.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan kegiatan sosialisasi pembinaan karakter aparatur desa dan pengurus RT dan juga telah membentuk tim penanganan konflik daerah serta tim kewaspadaan dini di daerah dan FKDM telah berjalan dengan baik dengan memberikan informasi terkini berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga setiap ada permasalahan yang akan timbul dapat diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan. Oleh karena itu capaian kinerja dengan sasaran terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA dengan indikator persentase konflik antar suku, agama, ras dan golongan dapat tercapai dengan baik dengan tidak



adanya kasus konflik antar suku, agama dan ras di Kabupaten Malinau di tahun 2021.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase konflik antar suku, agama dan ras	91,67	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	66,82
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	93,95

Dari tabel di atas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja persentase konflik antar suku, agama dan ras mencapai angka 91,67%, dengan rata-rata realisasi keuangan 82,67%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dan program



peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program dalam pencapaian indikator kinerja persentase konflik antar suku, agama dan ras adalah Rp. 1.136.316.800,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 1.256.493.800,00. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran 90,44%.

Misi 8 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;

Tujuan : Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA

Pengukuran Tujuan Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA secara luas melalui 1 (satu) Sasaran dengan 2 (dua) Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

Tabel 3.15
Evaluasi Pencapaian Sasaran 15
Meningkatnya kualitas air dan udara

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Indeks Kualitas Air	Nilai	0<IP<1,0	3,39	342,42%
Indeks Kualitas Udara (ISPU)	Nilai	0-50	96,21	192,42%

1. Indeks Kualitas Air

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara dengan indikator indeks kualitas air tahun 2021 adalah 3,39. Hal ini berarti bahwa kondisi kualitas air tersebut statusnya adalah **tercemar ringan** atau ***slightly polluted*** (sesuai dengan kategori kelas indeks polusi yaitu $1,0 < IP \leq 5,0$ = tercemar ringan).

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung indeks kualitas air yaitu:

$$IP = \frac{\sqrt{(C_t/L_{ij})_{Rata-rata} + (C_t/L_{ij})^2_{Maksimum}}}{2}$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.15.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Kualitas Air	Nilai	3,39	4,02	1,40	2,44	118,58%	41,29%	71,97%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi indeks kualitas air tahun 2021 sebesar 3,39 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 2,44, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 71,97% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.15.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Indeks Kualitas Air	Nilai	3,39	0<IP<1,0	342,42%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi indeks kualitas air tahun 2021 sebesar 3,39 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 0<IP<1,0, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 342,42% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

2. Indeks kualitas udara (ISPU)

Sedangkan untuk pencapaian indeks kualitas udara (ISPU) Kabupaten di tahun 2021 sebesar 96,21. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara tersebut statusnya **Sedang** yang artinya tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika (sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor : Kep-45/MENLH/10/1977 Tentang Indeks Standar Pencemaran Udara tanggal, 13 Oktober 1977, yaitu Sedang =51-100).

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung indeks kualitas udara (ISPU) yaitu:

$$IKU=100-[50/0,9x(Ieu-0,1)]$$

Tabel 3.15.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Kualitas Udara (ISPU)	Nilai	96,21	91,51	93,72	101,42	95,11%	97,41%	105,41%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi indeks kualitas udara (ISPU) tahun 2021 sebesar 96,21 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 101,42, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 105,41% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.15.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Indeks Kualitas Udara (ISPU)	Nilai	96,21	0-50	192,42%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi indeks kualitas udara (ISPU) tahun 2021 sebesar 96,21 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 0-50, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 192,42% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kualitas Air merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. IKA merupakan nilai tunggal terhadap kualitas air yang diperoleh dari integrasi beberapa parameter penyusunnya pada waktu dan lokasi tertentu. Semakin tinggi nilai IKA maka semakin baik kualitas air tersebut. Acuan yang digunakan untuk menghitung IKA adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air Menteri Negara Lingkungan Hidup. Untuk menghitung IKA dilakukan dengan menggunakan metode STORET (Secara prinsip metoda STORET adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air) dan Indeks



Pencemaran ((*Pollution Index*) yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan (Nemerow, 1974). Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Pencemaran.

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Metodologi perhitungan indeks kualitas udara mengadopsi program Uni Eropa melalui *European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project*, yaitu “*Common Informatiob to European Air*” (*Citeair II*) dengan judul *CAQI Air Quality Index: Comparing Urban Air Quality Actross Borders – 2012*. *Common Air Quality Index (CAQI)* ini digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata per jam, harian, dan tahunan. Sehubungan dengan baku mutu udara Indonesia masih mengacu pada PP 41/1999 yang bersifat longgar

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Pada tahun 2021 untuk meningkatkan kualitas air dan udara, Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan target indeks kualitas air $0 < IP < 1,0$ dengan capaian sebesar 3,39 atau 342,42%. Sedangkan target indeks kualitas udara (ISPU) sebesar 0-50 dengan capaian kinerja sebesar 96,21 atau 192,42%. Kedua capaian indikator kinerja tersebut belum dapat mencapai target RPJMD, yaitu target $0 < IP < 1,0$ yang artinya indeks kualitas air yang memenuhi baku mutu (*good*) dan target indikator indeks kualitas udara (ISPU) yaitu 0-50 yang artinya Baik (Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan atau nilai estetika).

Pada tahun 2021 capaian sasaran meningkatnya kualitas air dan udara dengan indikator kinerja indeks kualitas air dengan target $0 < IP < 1,0$ terealisasi sebesar 3,39 (nilai) atau 342,42%. Capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori **sangat baik** karena melebihi 100%, namun pada segi pencapaian nilai indeks mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan hasil capaian indeks kualitas air ke dalam kategorikelas indeks pollutan sebagai berikut:

- $0 \leq IP \leq 1,0$ = memenuhi baku mutu (*good*);
- $1,0 < IP \leq 5,0$ = tercemar ringan (*slightly polluted*);
- $5,0 < IP \leq 10$ = tercemar sedang (*fairly polluted*);



- $IP > 10,0$ = tercemar berat (*heavily polluted*).

Dengan melihat kategori kelas indeks pollutan diatas dan hasil pencapaian indeks kualitas air di tahun 2021 sebesar 3,39 (nilai), maka terlihat bahwa capaian tersebut masuk dalam kategori $1,0 < IP \leq 5,0$ artinya **tercemar ringan** (*slightly polluted*).

Sedangkan indikator kinerja indeks kualitas udara (ISPU) dengan target 0-50 telah terealisasi sebesar 96,21 atau 192,42%, sehingga capaian persentase tersebut termasuk dalam kategori **sangat baik**. Sedangkan untuk pencapaian indeks kualitas udara (ISPU) Tahun 2021 sebesar 96,21. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara tersebut termasuk dalam kategori **“Sedang”** yang artinya *tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika* (sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-45/MENLH/10/1997 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara Tanggal 13 Oktober 1997, yaitu **“Sedang = 51-100”**).

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas air dan udara dengan kedua indikator tersebut diatas masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi belum memenuhinya capaian realisasi dari target yang telah ditentukan, yaitu:

- 1) Data sampel air yang diuji selama ini belum mewakili seluruh area di Kabupaten Malinau. Sungai yang dilakukan pengujian sampel adalah Sei Malinau, Sei Sesayap dan Sei Sembuak. Dan yang belum diuji adalah Sei Mentarang, Sei Kayan, Sei Bahau, Sei Bengalun, Sei Nawang. Dan setiap pengambilan sampel di setiap sungai adalah 2 titik dan dilakukan 3 kali pengambilan dalam 1 tahun.
- 2) Data uji indeks kualitas udara (IKU) yang disajikan selama ini adalah data hasil uji *pasive sampler* yang dilaksanakan oleh KLHK, dan hasil uji tersebut terbit pada tahun berikutnya, sedangkan pelaporan IKU adalah setiap triwulan tahun berjalan dan belum mewakili seluruh wilayah Kab. Malinau
- 3) Masih minimnya anggaran yang dialokasikan pada kegiatan pencapaian indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (ISPU).
- 4) Belum maksimalnya pemanfaatan laboratorium lingkungan hidup yang ada dalam mendukung dan menunjang pencapaian indeks kualitas air dan



indeks kualitas udara (ISPU).

- 5) Uji kualitas air dan udara masih dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga hal ini membutuhkan waktu dan anggaran yang tentunya tidak sedikit.

Adapun beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam mencapai kinerja sasaran indeks kualitas air dan indeks kualitas udara (ISPU), diantaranya adalah :

- 1) Berusaha untuk menyediakan data indeks kualitas udara (IKU) pada setiap triwulannya dengan berkoordinasi baik dengan instansi vertikal (DLH Provinsi maupun Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)) maupun dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (Perusahaan dan para pemilik usaha dan/atau kegiatan).
- 2) Melakukan peningkatan atau penambahan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran, terutama pencapaian indeks kualitas air dan indeks kualitas udara (ISPU) dengan memperhitungkan ketersediaan dan kebutuhan anggaran pada tahun bersangkutan dengan memperhatikan skala prioritas program dan kegiatan.
- 3) Berusaha untuk menjadikan peralatan laboratorium yang dimiliki untuk mendukung pemantauan kualitas lingkungan guna pencapaian data kualitas lingkungan (data kualitas air maupun udara), dan hal ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan anggaran yang cukup guna menjadikan laborotarium lingkungan menjadi laboratorium yang terstandarisasi baik dari segi SDM maupun peralatannya.
- 4) Jika laboratorium yang dimiliki sudah dikelola dengan baik, diharapkan uji kualitas air dan udara dapat dilakukan sendiri sehingga tidak akan membutuhkan waktu yang lama dan anggaran yang besar dalam pengujiannya.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan



melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.15.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air	342,42	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	99,56
	Indeks kualitas udara (ISPU)	192,42	– Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota – Subkegiatan Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ko ta – Kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota – Subkegiatan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja indeks kualitas air mencapai angka 342,42%, capaian



indikator kinerja Indeks kualitas udara (ISPU) mencapai angka 192,42%, dengan rata-rata realisasi Keuangan 99,56%. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota
 - Subkegiatan Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota
 - b. Kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota
 - Subkegiatan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pada sub bab analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas penyerapan anggaran terhadap capaian kinerja. Berikut ini merupakan rumus perhitungan untuk mendapatkan nilai efisiensi sumber daya.

$$E = 1 - \frac{(RAK / RVK)}{(PAK / TVK)} \times 100\%$$
$$Efisiensi = 1 - \frac{Penyerapan Anggaran}{Capaian Kinerja} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program, kegiatan dan subkegiatan dalam pencapaian indikator kinerja indeks kualitas air sebesar Rp 49.948.000 dan indeks kualitas udara (ISPU) sebesar Rp 49.866.000,00, sementara target biaya untuk program, kegiatan dan subkegiatan dalam pencapaian indikator kinerja indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yaitu Rp 100.252.000,00 dengan rincian target biaya untuk indeks kualitas air sebesar Rp 50.252.000,00 dan indeks kualitas udara sebesar Rp 50.000.000,00.

Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran untuk pencapaian indeks kualitas air sebesar 70,97% dan efisiensi anggaran untuk pencapaian indeks kualitas udara sebesar 48,17%.



Misi 9 : Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Tujuan : Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Pengukuran Tujuan Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel secara luas melalui 1 (satu) Sasaran dengan 3 (tiga) Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

Tabel 3.16
Evaluasi Pencapaian Sasaran 16
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Status Laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	100%
Nilai Sakip	Nilai	A	CC	71,42%
Nilai LPPD	Status	Sangat Tinggi		

Pada tabel 3.16 di atas dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja :

1. Status laporan keuangan daerah (Opini BPK)

Berdasarkan Pasal 240 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan memiliki kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan memberikan keyakinan memadai (*reasonable assume*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan Prinsip Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena



itu, BPK akan memberikan opini/pendapat atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan. Opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria umum sebagai berikut : 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI); Pemerintah Kabupaten Malinau telah berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 (tujuh) tahun berturut-turut atas 43 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Status Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2021 mencapai 100% yang artinya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil di capai berdasarkan standar pemeriksaan BPK. Sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan indikator sasaran yaitu opini BPK Republik Indonesia terhadap laporan keuangan pemerintah daerah menjadi sasaran utama dari beberapa target di Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mencapai visi dan tujuan. Pencapaian WTP opini BPK mencerminkan kinerja pengelola keuangan daerah dilakukan dengan maksimal. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah melakukan penyusunan laporan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang diungkapkan juga sesuai dengan ketentuan. Penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Analisis capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dengan realisasi maupun capaian kinerja seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau telah 7 (tujuh) kali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Kaltara. Penyerahan opini WTP ini diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltara, Agus Priyono Kepada Bupati Malinau Wempi W Mawa, di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltara di Tarakan pada bulan Mei 2021. Opini WTP BPK RI juga menggambarkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan

pemerintahan daerah telah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai kaidah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun stakeholder terkait.

Sesuai dengan tabel diatas analisis capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2020 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Status laporan keuangan daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi Status laporan keuangan daerah (Opini BPK) tahun 2021 yaitu WTP dengan realisasi tahun 2020 dengan opini WTP, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 100% terhadap capaian tahun 2021.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021 2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Status laporan keuangan daerah (Opini BPK)	Status	WTP	WTP	100%



Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi Status laporan keuangan daerah (Opini BPK) tahun 2020 yaitu WTP dengan target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu WTP, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, capaian kinerja untuk indikator kinerja Status Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2021 mencapai 100% yang artinya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil di capai berdasarkan standar pemeriksaan BPK. Pencapaian WTP mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah melakukan penyusunan laporan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang diungkapkan juga sesuai dengan ketentuan. Penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Analisis capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dengan realisasi maupun capaian kinerja seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Opini WTP juga menggambarkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah telah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun *stakeholder* terkait.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan indikator:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
3. Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Selain itu, ada 5 kriteria yang menjadi dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan Keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kelangkaan, (5) Pengungkapan. Kabupaten Malinau



senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan.

Keberhasilan dalam pencapaian target bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target antara lain:

- a. Data yang tidak akurat/data yang tidak valid
- b. Laporan Keuangan dari setiap SKPD yang lambat atau tidak tepat waktu
- c. Sumber daya manusia pengurus barang OPD/Pengurus Barang masih ada yang kurang memiliki kompetensi dibidang penatausahaan dibidang aset.
- d. Dari sisi data, data aset belum semua OPD tertata dengan baik/belum tertib.
- e. Dari sisi administrasi dan penyimpanan masih belum tertib.

Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau pada tahun yang akan datang perlu dilakukan Alternative maupun strategi sebagai berikut;

- a. Komitmen semua ASN dan *stakeholder* maupun pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Peran APIP dalam pemantauan penerapan SPI di masing-masing OPD perlu dioptimalkan
- c. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan melalui program peningkatan kapasitas aparatur, khususnya aparatur pengelola keuangan, maupun melalui upaya perbaikan sistem dan kebijakan sistem dan kebijakan akuntansi serta manajemen aset.
- d. Perbaikan sistem melalui rencana aksi (*action plan*) agar proses perbaikan yang dilakukan jelas, terarah, terukur dan terpadu. Sehingga kelemahan dalam pengelolaan keuangan tidak terulang dimasa yang akan datang.
- e. Memprioritaskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset.
- f. Tertib penyampaian laporan keuangan.
- g. Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- h. Mengadakan pelatihan/bimtek mengenai pengelolaan keuangan daerah pada SKPD.
- i. Menyelenggarakan bimtek dan sosialisasi terkait Surat Edaran penyusunan laporan keuangan.
- j. Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait.

- k. Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.
- l. Menyelenggarakan bimtek pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Tersedianya Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Malinau terkini secara Cepat dan akurat serta Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, Transparan dan akuntabel.	Status Laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	97,22 %	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	91,97
			2. Program Pengelolaan keuangan Daerah	90,77
			3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	98.01
			4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	80,96

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya sehingga dapat



disimpulkan realiasi anggaran dari setiap program berkisar antara 80,98% - 98,01% dan total realisasi mencapai 90,43% menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hasil pengukuran kinerja ini juga menjadi bahan evaluasi dan analisis kinerja atas keberhasilan dan kegagalan sehingga pencapaian sasaran strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malinau dianalisa penyebab tercapai atau tidaknya, hal ini dilakukan agar pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran mudah untuk diformulasikan dalam program dan kegiatan.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni 1. fektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya, 2. efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

1. efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase efisiensi biaya} &= 100\% - \frac{\text{Rp. 37.878.365.556,-}}{\text{Rp. 41.187.163.125,-}} \times 100\% \\ &= \mathbf{91,97\%} \end{aligned}$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 37.878.365.556,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 41.187.163.125, Dengan rumus efisiensi diatas diperoleh persentase efisiensi anggaran pada kisaran 80,98 % - 98,01 %. Persentase efisiensi ini secara teori sudah singnifikan, sehingga dapat diasumsikan pada tahun 2021 secara umum terdapat efisiensi yang singnifikan dari penggunaan sumber daya anggaran yang dapat dilihat pada pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan dalam program. Persentase yang singnifikan ini dapat dilihat dengan penjelasan sebagai berikut;



1. kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 91,97 %. Didukung dengan;
 - a. ada nya penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dengan upaya Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Laporan capaian kinerja yang dikelola dan didistribusi secara berkala dan berjenjang sehingga tepat waktu dan baik.
2. kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 90,77% didukung dengan adanya;
 - a. Peningkatan kepatuhan terhadap aturan perundang- undangan;
 - b. Meningkatkan peran PPK-SKPD untuk meyakini compliance;
 - c. Peningkatan kualitas laporan keuangan dengan upaya mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, bimbingan secara berkala dan berkelanjutan tentang tata kelola keuangan dan pelaporan keuangan secara berkala dan berkelanjutan;
 - d. Akselerasi tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah dengan penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan upaya meningkatkan peran dan kedudukan strategis bidang akuntansi sebagai perumus kebijakan teknis urusan pemerintahan yang meliputi evaluasi dan pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi dan neraca daerah;
 - e. Meningkatkan ketersediaan peraturan, kebijakan, sistem operasional prosedur, mekanisme, petunjuk pelaksana/teknis.
 - f. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Penguatan Monitoring dan Evaluasi
 - g. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
 - h. Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) dengan upaya mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai berikut : a. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); b. *Financial Management Information System (FMIS)*
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) persentase efisiensinya adalah sebesar 98,01%. Didukung dengan adanya;
 - a. Pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.
 - b. Menyelenggarakan bimtek pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).



- c. Pemeliharaan jaringan aplikasi SIMDA BMD dan aplikasi SIBAPA
 - d. SDM Penatausahaan BMD yang lebih memadai
 - e. Adanya jaringan online pada aplikasi SIMDA BMD.
4. dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar 80,98% didukung dengan adanya
- a. Penagihan pajak secara *Self Assesment*
 - b. Pemasangan alat *Tapping Server*
 - c. Pemasangan alat kasir/mesin kasir
 - d. Sosialisasi kepada wajib pajak dalam upaya peningkatan PAD
 - e. Pemeliharaan aplikasi SPT Online
 - f. Pelaporan pajak daerah
 - g. Maintenance update SIMPATDA
 - h. Maintenance update Sim PBB
 - i. Pemeliharaan aplikasi PBB dan BPHTB Online

2. efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Upaya efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 (tiga) dalam pelaksanaan kegiatan, melibatkan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta seperti Bank untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan.

2. Nilai SAKIP

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi AKIP tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwa Pemerintah Kabupaten Malinau memperoleh nilai SAKIP tahun 2021 adalah 57,14 atau Predikat “CC”.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.4**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	CC	CC	89,30%	91,90%	97,50%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi nilai SAKIP tahun 2021 yaitu CC dengan realisasi tahun 2020 dengan nilai CC, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 97,50% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.5**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Nilai	CC	A	71,42%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi nilai SAKIP tahun 2021 yaitu CC dengan target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu A, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 71,42% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi AKIP tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,



bahwa Pemerintah Kabupaten Malinau memperoleh nilai SAKIP tahun 2021 adalah 57,14 atau Predikat “CC”. Penilaian SAKIP tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Malinau belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Berikut rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut::

- Nilai **Perencanaan Kinerja** pada SAKIP Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah 22.35, dimana belum memenuhi standar bobot penilaian yaitu 30,00%.
- Nilai **Pengukuran Kinerja** pada SAKIP Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah 12,4, dimana belum memenuhi standar bobot penilaian yaitu 25,00%
- Nilai **Pelaporan Kinerja** pada SAKIP Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah 8,96, dimana belum memenuhi standar bobot penilaian yaitu 15,00%
- Nilai **Evaluasi Internal** pada SAKIP Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah 2,78, dimana belum memenuhi standar bobot penilaian yaitu 10,00%
- Nilai **Capaian Kinerja** pada SAKIP Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah 10,62 belum memenuhi standar bobot penilaian yaitu 20,00%.

Tabel 3.16.6**Capaian Kinerja SAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2020**

KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI 2021
A. Perencanaan Kinerja	30%	22.35
B. Pengukuran Kinerja	25%	12,4
C. Pelaporan Kinerja	15%	8.96
D. Evaluasi Internal	10%	2.78
E. Capaian Kinerja	20%	10.62
Nilai Hasil Evaluasi	100%	57,14
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC

Secara umum, penerapan SAKIP pada pemerintah Kabupaten Malinau belum secara intensif dilakukan sebagai bagian dari penerapan manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Komponen-komponen SAKIP sebagaimana telah



disebutkan dalam tabel diatas masih mengandung banyak kelemahan antara lain meliputi:

- a. Unsur-unsur kunci dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya dirumuskan dengan baik. Sebagian besar perumusan tujuan dan sasaran strategis ditingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah belum sepenuhnya merumuskan kinerja yang berorientasi pada hasil dan belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi. Hal tersebut dapat mengakibatkan keberhasilan pencapaian kinerja atau sasaran strategis tidak dapat memberikan manfaat yang secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat.
- b. Rumusan dalam perencanaan kinerja belum seluruhnya dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, relevan, terukur dan cukup serta belum disertai dengan target-target kinerja yang memadai sehingga indikator kinerja yang telah ditetapkan belum mampu menunjukkan ketepatan dan keandalan dari ketercapaian kinerja.
- c. Perencanaan kinerja Pemerintah Daerah belum sepenuhnya dijabarkan dengan baik ke dalam perencanaan kinerja pada level Perangkat Daerah, serta belum sepenuhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab-akibat dan belum menggambarkan solusi pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang di hadapi Pemerintah Daerah. Hal ini menggambarkan bahwa penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga belum dapat terlihat hubungan lintas fungsi antar Perangkat Daerah yang dibutuhkan untuk mendukung ketercapaian kinerja daerah.
- d. Sasaran strategis belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemilihan program dan kegiatan sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang kurang relevan dalam pencapaian sasaran strategis sebagai kinerja daerah. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak efektif dan efisien yang dapat berdampak pada pemborosan dalam penggunaan anggaran daerah.
- e. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian target-target kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif dan berkala hingga ke level organisasi terendah;
- f. Informasi pada laporan kinerja belum menyajikan pengungkapan yang berkualitas. Laporan kinerja masih menyajikan informasi yang terbatas pada rincian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga laporan

kinerja belum mampu menghasilkan umpan balik yang dapat digunakan sebagai perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya.

- g. Evaluasi internal terhadap akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya memberikan rekomendasi spesifik yang berkualitas kepada setiap Perangkat Daerah sehingga evaluasi internal belum secara optimal mendorong perbaikan manajemen kinerja yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan penerapan SAKIP pada tingkat Pemerintah Daerah dan OPD, langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan review untuk menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja (RPJMD, renstra dan PK OPD sampai dengan PK staf).
- 2) memastikan bahwa rumusan tujuan/sasaran strategis telah berorientasi hasil/outcome, menyempurnakan ketepatan indikator-indikator kinerja agar memenuhi kriteria smart dengan berpedoman Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan telah didampingi oleh tim SAKIP Provinsi Kalimantan Utara.
- 3) Membuat pohon kinerja berdasarkan isu strategis.
- 4) Melakukan perbaikan pelaporan kinerja (LKjIP) dengan menyajikan informasi dan analisis lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.
- 5) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas implementasi manajemen kinerja OPD untuk perbaikan perencanaan kinerja, manajemen kinerja dan peningkatan kinerja OPD.





- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.16.7
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP	CC (56,32)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99,82

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja Nilai SAKIP dengan predikat cc dengan realisasi keuangan 99,82%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program yang terkait peningkatan Nilai SAKIP adalah Rp. 129.588.800, sementara target biaya untuk program yaitu Rp 130.288.800. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran 96,46%.

3. Nilai LPPD

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kabupaten Malinau tahun anggaran 2021 belum bisa disajikan karena belum ada pengumuman resmi nilai LPPD dari Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.8

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nilai LPPD	Status	-	Tinggi	Tinggi	-	-	-	-

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah yang disebut LPPD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini merupakan wujud pertanggungjawaban tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai pelaksanaan dari visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini mengacu pada surat edaran Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 120.04/6977/OTDA, tanggal 31 Desember 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan instrumen pembinaan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga hak dan kewenangan daerah dalam mengelola otonomi tetap sejalan dengan cita-cita nasional.

Misi 10 : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;

Tujuan : Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Pengukuran Tujuan Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan secara luas melalui 3 (tiga) Sasaran dengan 3 (tiga) Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel 3.17
Evaluasi Pencapaian Sasaran 17
Meningkatnya kesetaraan gender

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Indeks Pembangunan Gender	%	100	74,46	74,46%

Dari Tabel 3.17 di atas, realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2021 adalah 74,46% dari target 100%, dengan capaian kinerja sebesar 74,46%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.17.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Pembangunan Gender	%	74,46	73,77	73,93	74,35	99,07%	99,28%	99,85%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi Indeks Pembangunan Gender tahun 2021 yaitu 74,46% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 74,35%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 99,85% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.17.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Indeks Pembangunan Gender	%	74,46	100	74,46%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi Indeks Pembangunan Gender tahun 2021



sebesar 74,46% dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 74,46% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diformulasikan sebagai rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki. Nilai indeks pembangunan perempuan dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka indeks pembangunan gender ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2021 jumlah penduduk perempuan berpendidikan dari data SIAK Disdukcapil Kabupaten Malinau adalah 28,874 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 38,774 jiwa. Untuk menghitung indeks pembangunan gender formulasi yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{jumlah penduduk perempuan menurut pendidikan}}{\text{jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$$

Dengan formulasi di atas, maka realisasi kinerja tahun 2021 adalah 74,46% yakni hasil dari jumlah penduduk perempuan berpendidikan (28.873) jiwa dibagi jumlah penduduk perempuan (38,774) jiwa dikali 100%. Jadi untuk capaian kinerja tahun 2021 adalah 74,46%.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau untuk meningkatkan indeks pembangunan gender antara lain melakukan sosialisasi peningkatan pemahaman tentang hak-hak dasar perempuan dan pengembangan kapasitas pengurus organisasi dan lembaga perempuan serta meningkatkan kegiatan organisasi perempuan.



- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.17.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	74,46	1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	96,00
			2. Program sistem data gender dan anak	29,88

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja indeks pembangunan gender sebesar 74,46% dengan rata-rata realisasi keuangan 62,94%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Program Data Gender dan Anak.

- c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program yang terkait peningkatan nilai indeks pembangunan gender adalah Rp. 255.210.000,00, sementara target

biaya untuk program yaitu Rp. 259.929.000,00. Dengan rumus efesiensi diatas diperoleh persentase efesiensi anggaran 98,18%.

Tabel 3.18
Evaluasi Pencapaian Sasaran 18
Meningkatnya pemberdayaan gender

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Indeks Pemberdayaan Gender	%	85	74,82	88,02%

Capaian Indek Pemberdayaan Gender Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah 88,03%. Untuk menghitung realisasi Indeks Pemberdayaan Gender adalah jumlah pekerja perempuan pada lembaga pemerintahan yaitu 2.919 jiwa ditambah pekerja perempuan pada lembaga non pemerintah yaitu 26.095 jiwa dibagi jumlah penduduk perempuan yaitu 38,774 dan di kali 100.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung indeks pemberdayaan gender yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah pekerja perempuan pada lembaga pemerintahan}}{\text{Jumlah pekerja perempuan pada non pemerintah}} \times 100$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018,2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.18.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Pemberdayaan Gender	%	74,82	73,78	74,01	75,11	98,61%	98,91%	100,38%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2021 yaitu 74,82% dengan realisasi tahun 2020 dengan nilai 75,11%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 100,38% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.18.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Indeks Pemberdayaan Gender	%	74,82	85	88,02%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2021 sebesar 74,82% dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 85%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 88,02% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternatif solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Indeks Pemberdayaan Gender dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknis. Indeks



Pemberdayaan Gender digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapasitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah 88,02%. Untuk menghitung realisasi Indeks Pemberdayaan Gender adalah jumlah pekerja perempuan pada lembaga pemerintahan yaitu 2.919 jiwa ditambah pekerja perempuan pada lembaga non pemerintah yaitu 26.095 jiwa dibagi jumlah penduduk perempuan yaitu 38,481 dan di kali 100. Jadi realisasi indeks pemberdayaan gender tahun 2021 adalah 74,82.

Indeks Pemberdayaan Gender hampir mencapai target yang telah ditargetkan karena :

- a) Adanya dorongan perempuan dalam meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat.
- b) Memberikan bimbingan dan motivasi di segala bidang tentang pentingnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.18.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	88,02	1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	96,00
			2. Program sistem	29,88



			data gender dan anak	
			3. Program perlindungan perempuan	88,97

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja indeks pembangunan gender sebesar 88,02% dengan rata-rata realisasi keuangan 71,61%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program yang terkait peningkatan nilai indeks pembangunan gender adalah Rp. 269.978.000,00, sementara target biaya untuk program yaitu Rp 276.597.000,00. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran 96,19%.

Tabel 3.19
Evaluasi Pencapaian Sasaran 19
Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	95	97	102,10%

Pada tabel di atas, evaluasi sasaran meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan dengan indikator kinerja persentase organisasi kepemudaan yang aktif untuk tahun 2021 dengan realisasi 97% dari target 95% dengan capaian kinerja sebesar 102,10%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase organisasi kepemudaan yang aktif yaitu:

$$\frac{\text{jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100\%$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.19.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	97	74,20	94	97	76,49%	96,90%	100%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi persentase organisasi kepemudaan yang aktif tahun 2021 yaitu dengan realisasi tahun adalah 97, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 100% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.19.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Persentase organisasi	%	97	95	102,10%



kepemudaan yang aktif				
--------------------------	--	--	--	--

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi persentase organisasi kepemudaan yang aktif tahun 2021 sebesar 97 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 95, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 102,1% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, organisasi kepemudaan juga dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Oleh karenanya, pembinaan terhadap organisasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan.

Organisasi kepemudaan adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak-anak sekolah yang masuk kategori pemuda, bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Organisasi kepemudaan ini berdiri bersama dengan visi dan struktur kepemimpinan, budaya dan model aktualisasi ide dan gagasan. Organisasi kepemudaan mempunyai banyak manfaat. Tidak hanya mendapat teori organisasi tetapi banyak mendapat pengalaman langsung mengenai manajemen organisasi, budaya organisasi, komunikasi organisasi dan pengembangan organisasi. Selain itu juga mengasah jiwa kepemimpinan dan kebijaksanaan diri bagi para pemuda ketika mereka aktif di dalam organisasi.

Pada tabel di atas, evaluasi sasaran meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan dengan indikator kinerja persentase organisasi kepemudaan yang aktif untuk tahun 2021 dengan realisasi 97% dari target 95% dengan capaian 102,1%. Adapun organisasi kepemudaan yang aktif di Kabupaten Malinau yaitu:

- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)



- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
- KB POLRI Kabupaten Malinau
- Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Malinau
- Pemuda Muslimin Kabupaten Malinau
- Pemuda Katolik Kabupaten Malinau
- Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Utara (Malinau)
- Generasi Muda Tanjung Lapang (GEMTAL) Malinau
- Forum Komunikasi Generasi Muda Mentarang (FKGMM)
- Himpunan Pemuda Tenguyung (HPT) Kabupaten Malinau
- Pemuda Flobamora Kabupaten Malinau
- Karang Taruna Kecamatan Malinau
- Karang Taruna Kecamatan Mentarang
- Pemuda Demokrat IB Kabupaten Malinau
- Persekutuan Pemuda Dayak Abay Kabupaten Malinau
- Karang Taruna Kecamatan Malinau Barat
- Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Malinau
- Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Malinau
- Purna Paskibraka Indonesia (PPI)
- Forum Komunikasi Putra/putri Perwira TNI-Polri Indonesia Cabang Malinau
- Karang Taruna Bina Kami Desa Malinau Kota
- FKPPi Kabupaten Malinau
- Himpunana Kerukunan Putra/Putri Wredatama (HKPPW) Malinau
- Karang Taruna Piah Perun Desa
- Laskar Pemuda Dayak Kalimantan Utara
- Forum Pemuda Seni Penekendi Kec. Malinau Utara
- Pemuda Pancasila Kabupaten Malinau
- Himpunan Pemuda Raja
- Forum Generasi Muda (FORGEMA) Kabupaten Malinau
- Persatuan Pemuda GKII Daerah Malinau
- Badan Pengurus Pemuda Pelita Kanaan (BPPDK-PK)
- Pemuda Peduli Kelestarian Lingkungan Hidup (PPKH-LH)
- Perkumpulan Mahasiswa dan Pelajar Dayak Berusu



b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.19.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	97	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	97,68%
			2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100%
			3. Program Pengembangan	



			Kapasitas Kepramukaan	100%
--	--	--	-----------------------	------

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya sehingga dapat disimpulkan realisasi capaian kinerja persentase organisasi kepemudaan yang aktif sebesar 97% dengan rata-rata realisasi anggaran mencapai 100% menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Hasil pengukuran kinerja ini juga menjadi bahan evaluasi dan analisis kinerja atas keberhasilan dan kegagalan sehingga pencapaian sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau dapat dianalisa penyebab tercapai atau tidaknya.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain :

- efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Upaya efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke tiga dalam pelaksanaan kegiatan, melibatkan tenaga ahli dan lembaga organisasi untuk melaksanakan kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga.

- efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran

Persentase efektivitas dan efisiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 2.708.499.886,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 2.750.007.686,00. Dengan rumus efisiensi diatas diperoleh persentase efisiensi anggaran pada kisaran 98,49% sehingga dapat diasumsikan pada tahun 2021 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya anggaran. Adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan dalam program seperti



kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar 97,68%, kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar 100%, dan kegiatan pada Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebesar 100%.

Misi 11 : Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;

Tujuan : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata

Pengukuran Tujuan Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata secara luas melalui 3 (tiga) Sasaran dengan 3 (tiga) Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

Tabel 3.20
Evaluasi Pencapaian Sasaran 20
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Jumlah wisatawan	Orang	8.000	15.811	197,63%

Pada tabel di atas, tahun 2021 realisasi sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator kinerja jumlah wisatawan dengan target 8.000 orang, terealisasi 15.811 orang dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 197,63%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah wisatawan yaitu:

$$\frac{\text{Realisasi jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malinau}}{\text{Jumlah kunjungan wisatawan yang ditargetkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.20.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah wisatawan	Orang	15.811	35.823	21.592	15.804	226%	136,5%	99,95%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi jumlah wisatawan tahun 2021 yaitu 15.811 orang dengan realisasi tahun 2020 sebesar 15.804 orang, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 99,95% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.20.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Jumlah wisatawan	Orang	15.811	8.000	197,63%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi jumlah wisatawan tahun 2021 sebesar 15.811 orang dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 8.000 orang, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 197 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



Pemerintah Kabupaten Malinau terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau memiliki berbagai macam objek wisata, baik objek wisata alam, wisata budaya dan beberapa desa wisata yang menjadi daya tarik wisatawan untuk menghabiskan waktu libur di Malinau. Tingkat kunjungan wisata di berbagai objek di Kabupaten Malinau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tabel di atas, tahun 2021realisasi meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator kinerja jumlah wisatawan dengan target 8.000 orang , terealisasi 33.399 orang dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 404,99 %Hal ini merupakan hasil positif dari berbagai promosi wisata Kabupaten Malinau yang dilakukan dengan cara memperkenalkan kebudayaan tradisional/adat masyarakat lokal di berbagai event nasional maupun internasional.

Jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2021dibandingkan dengan tahun 2020meningkat dikarenakan kondisi dan kasus covid 19 di khususnya Kabupaten Malinau berkurang. Sehingga Pemerintah Kabupaten Malinau mengeluarkan kebijakan membuka kembali tempat/destinasi wisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Di Kabupaten Malinau ada 5 Destinasi wisata yang sering dikunjungioleh wisatawan baik wisatawan Lokal, Luar Daerah maupun Luar Negeri yaitu Desa Wisata Setulang, Long Alango, Apau Ping, Desa Wisata Pulau Sapi, Objek Wisata Air Panas Semolon, dan Desa Wisata Long Loreh.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pada Tahun sebelumnya, dalam upaya peningkatan kunjungan wisatawan, Dinas Pariwisata dalam hal ini melalui Bidang Destinasi menyusun progfam pembangunan Objek Wisata (Pembangunan Destinasi Wisata). Melalui pembangunan Destinasi Wisata diharapkan akan meningkatkan kualitas atau ketersediaan bangunan yang nantinya akan membuat wisatawan merasa nyaman dalam melakukan perjalanan wisata dan diharapkan dengan ketersediaan

infrastruktur tersebut akan berpengaruh pada kunjungan wisatawan di Objek wisata yang ada di Kabupaten Malinau.

pada Tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak melaksanakan kegiatan Pembangunan Destinasi Wisata secara Fisik tetapi tetap melaksanakan kegiatan yang mendukung dalam pengembangan Destinasi Pariwisata yaitu Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Objek Wisata yaitu dengan menganggarkan Honorarium Petugas Pemeliharaan Kebersihan Objek Wisata sebanyak sebanyak 4 Orang, yaitu pada Objek Wisata Tane' Olen dan Objek Wisata Semolon.

Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula.

Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.20.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	197 %	Program Peningkatan Daya tarik Pariwisata 1. Belanja Alat Kebersihan 2. Honorarium Petugas kebersihan Objek Wsata	100 100

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 jumlah wisatawan yaitu 15.811 orang melebihi target pada tahun tersebut, dengan capaian indikator kinerja Persentase jumlah wisatawan yaitu 197 %. Adapun program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Penataan Program Pengembangan Destinasi.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program/kegiatan, pemanfaatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dilaksanakan dengan melibatkan staf yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selain itu juga dengan melakukan perekrutan Honor petugas kebersihan Objek Wisata sebanyak 4 Orang yang ditugaskan pada Objek wisata Tane Olen 2 orang dan Objek Wisata Semolon sebanyak 2 orang.

Keberhasilan suatu program/kegiatan pada suatu Instansi selain didukung dengan Sumber Daya Manusia juga perlu didukung dengan Sumber daya Anggaran. Ketersediaan anggaran yang cukup akan menjamin terlaksananya program/kegiatan dari awal sampai akhir. Dalam upaya pengembangan Destinasi Pariwisata, pada Tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak melaksanakan kegiatan Pembangunan Destinasi Wisata secara Fisik tetapi tetap melaksanakan kegiatan yang mendukung dalam pengembangan destinasi pariwisata yaitu pemeliharaan sarana dan pra sarana objek wisata Rp 30.000.000,00 dan honorarium Kebersihan sebesar Rp 30.000.000,00

Tabel 3.21
Evaluasi Pencapaian Sasaran 21
Meningkatkan Kualitas Seni dan Budaya Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase Sanggar Seni Yang Aktif	%	100%	100%	100%

Pada tabel di atas, tahun 2021 realisasi sasaran Meningkatnya Kualitas Seni dan Budaya Daerah dengan indikator kinerja persentase sanggar seni yang aktif dengan target 100%, terealisasi 100% dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.21.1**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Sanggar Seni Yang Aktif	%	100	34	100	100	34%	100%	100%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi Jumlah Sanggar Seni yang aktif dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 100 %, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 100 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.21.2**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Target RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Persentase sanggar seni yang aktif	%	100	100 %	100 %

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi persentase sanggar seni yang aktif tahun 2021 sebesar 100% dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.



- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sanggar seni merupakan suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk kegiatan seni seperti seni tari, seni lukis, seni kerajinan, seni peran dan lain-lain. Kegiatan dari sanggar seni berupa kegiatan pembelajaran tentang seni, yang meliputi proses dari pembelajaran, penciptaan hingga produksi dan semua proses hampir sebagian besar dilakukan di dalam sanggar seni.

Sanggar seni biasanya didirikan secara mandiri atau perorangan. Mengenai tempat dan fasilitas sanggar seni tergantung dari masing-masing sanggar seni, ada yang kondisinya sangat terbatas namun ada juga yang memiliki fasilitas lengkap. Selain itu sistem atau seluruh kegiatan yang terjadi dalam sanggar seni sangat fleksibel seperti menyangkut prosedur administrasi, pengadaan sertifikat dan lain-lain.

Keberagaman seni dan budaya di Kabupaten Malinau menjadi daya tarik bagi wisatawan dari dalam dan luar negeri untuk mengunjungi Kabupaten Malinau. Dalam perkembangannya dari berbagai aspek, maka Kabupaten Malinau tetap memelihara sanggar seni dan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Sanggar seni yang aktif di Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Bebelen Ibenayuk Tengilan
2. Sanggar Seni Umbak Taka
3. Sanggar budaya Tunas Muda Kab. Malinau
4. Sanggar Seni Bangen Tawai
5. Sanggar Seni Pebeka Tawai Malinau
6. Sanggar Seni Busak Baku
7. Sanggar Tari Inculod
8. Sanggar Tari Jonan Madang
9. Sanggar Tari Uyang Lahai
10. Paguyuban Kuda Lumping Taruna Mudho
11. Sanggar Tari Bangen Tavai Tanjung Keranjang
12. N'caut Dayak Berusu
13. Sanggar Tari Leku Sulau
14. Sanggar Seni Dayak Ulong Da'a
15. Sanggar seni yandalun



16. Sanggar Tari Arang Ndimung
17. Sanggar Seni Engkap Lun
18. Sanggar Tari Tengguyun
19. Sanggar Tari Busak Labu
20. Puling Laring
21. Suwit
22. Kalawon Grup
23. Yolomar Grup
24. Busak Baku
25. Intamu Grup
26. Sayung Midang
27. Luluyun
28. Sayung Idan
29. Sanggar Seni Febaya Ferurung
30. Litul Mentarang
31. Inul Beru
32. Felefet
33. Sanggar Musik Etnis Dan Modern Kerukub Ebu
34. Sanggar Tari Ozed Dame
35. Hulung Pune
36. Lutung Mimbin
37. Ca'kimet Ca'tawai
38. Bangen Udip
39. Tane Olen
40. Temengang (Tenapan)
41. Acach Lenjo





b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Dalam upaya peningkatan kualitas dan keaktifan sanggar seni Dinas Pariwisata juga melaksanakan pembinaan, pembinaan yang dilakukan dengan selalu berkoordinasi dengan sanggar tari yang ada, serta dengan melibatkan Sanggar Seni yang ada pada even even budaya maupun pada even penyembutan tamu dari Luar daerah.

Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.21.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	100	Program pelayanan administrasi perkantoran 1. Pengadaan cinderamata dan tarian penyambutan tamu	100

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja persentase sanggar seni yang aktif mencapai angka 100%. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan indikator kinerja tersebut adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan pengadaan cinderamata dan tarian penyambutan tamu sebesar.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan Sumber Daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri dari dua yaitu : 1. Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia, 2. Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Biaya.

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dilaksanakan dengan melibatkan staf yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, selain itu meningkatkan koordinasi antara Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta juga koordinasi dengan sanggar seni yang ada.

Dalam upaya mendukung terlaksananya program/kegiatan,pada tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melibatkan/menunjuk sanggar seni untuk menyambut kedatangan tamu-tamu penting yang mengunjungi Kabupaten Malinau. Disamping itu juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga telah



menganggarkan Rp 84.810.000,- untuk pengadaan cinderamata yang diberikan kepada tamu. Cinderamata ini berasal dari sanggar seni yang ada.

Tabel 3.22
Evaluasi Pencapaian Sasaran 22
Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Cagar Budaya)	%	100%	0%	0%

Pada tabel di atas dengan sasaran meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah dengan indikator kinerja persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan target capaian 100 % di tahun 2021 realisasinya tidak ada situs budaya yang terdaftar karena pada tahun 2021 tidak ada kegiatan pendaftaran situs budayadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Cagar Budaya) yaitu:

$$\frac{\text{jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.22.1**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Cagar Budaya)	%	0	0	100	0	0	100	0

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Cagar Budaya) tahun 2021 yaitu 0% dengan realisasi tahun 2020 dengan 0%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 0% terhadap capaian tahun 2021.

Tahun 2021, Kabupaten Malinau tidak mendaftarkan situs cagar budaya benda tetapi mendaftarkan situs cagar budaya tak benda (Karya Budaya) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 3 warisan budaya dari Malinau yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda (Karya Budaya) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu ritual khusus Mamat dari etnis Kenyah, ritual khusus Pekiban dari etnis Kenyah sub suku Lepu' tau dan Adat istiadat Dolop dari etnis Tinggalan.

Tabel 3.22.2**Daftar Situs Cagar Budaya Kabupaten Malinau**

NO	NAMA OBJEK	LOKASI	KECAMATAN
1	Makam Raja Tidung Ke II Raja Tua	Desa Mentarang Baru	Kec. Mentarang
2	Tiang Rumah Kerajaan Tidung Malinau Alung Kabiran	Desa Malinau Hulu Tanjung Belimbing RT.8	Kec. Malinau Kota
3	Kubur Dayak Berusu dan Merap di Semendurut	Kab. Malinau	Kec. Malinau Barat
4	Kuburan Dayak Merap	Desa Langap	Kec. Malinau Selatan
5	Kuburan Batu Kenyah	Paya Seturan	Kec. Malinau Selatan



6	Kuburan Batu Katembu Long Pulung	Desa Long Brini	Kec. Bahau Hulu
7	Kuburan Lenggang Dan Belawing Dayak Kenyah	Desa Langap	Kec. Malinau Selatan
8	Makam Tidung Muara Kabiran dan Sisah Kuburan Dayak Lundayeh	Desa Kabiran Tepi Sungai Malinau	Kec. Malinau Kota
9	Kuburan Dayak Berusu	Desa Sesua	Kec. Malinau Barat
10	Kuburan Dayak Tinggalan	Desa Belayan	Kec. Malinau Utara
11	Makam Raja Hanifah	Desa Pulau Sapi	Kec. Mentarang
12	Kuburan Litun Dawat di Semendurut	Desa Setarap	Kec. Malinau Selatan Hilir
13	Kuburan Tanau	Desa Gong Solok	Kec. Malinau Selatan Hilir
14	Lonbong Matuo	Lumbis Induk	Kec. Malinau Utara
15	Kuburan Tajau I	Di sungai Mentarang Hulu	Kec. Mentarang Hulu
16	Kuburan Tajau II	Di sungai Mentarang Hulu	Kec. Mentarang Hulu
17	Kuburan Kuno Dalam Gua	Desa Long Jelet	Kec. Pujungan
18	Makam Cina dan Altar Dewa Bumi	Desa Luso	Kec. Malinau Utara
19	Kompleks Makam Kerajaan Tidung I	Jl. Raja Alam RT.6 Desa Malinau Kota	Kec. Malinau Kota
20	Kompleks Makam Kerajaan Tidung II	Jl. Raja Alam RT.6 Desa Malinau Kota	Kec. Malinau Kota
21	Rumah Adat Long Aran (Lu'ung Jalung)	Long Aran	Kec. Pujungan
22	Kuburan Batu Long Berini	Desa Long Berini	Kec. Bahau Hulu
23	Kuburan Tua	Long Nawang	Kec. Kayan Hulu
24	Kuburan Tua Uyang lahai	Desa Data Dian	Kec. Kayan Hilir
25	Batu Irang Dau	Desa Long Ampung	Kec. Kayan Selatan
26	Situs Kubur Tanah Liah	Belayan	Kec. Malinau Utara
27	Kubur Ngona	Sengayan	Kec. Malinau Selatan

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Malinau, 2021



Misi 12 : Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat;

Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Baik Dan Prima

Pengukuran Tujuan Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Baik Dan Prima secara luas melalui 1 (satu) Sasaran dengan 1 (satu) Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

Tabel 3.23
Evaluasi Pencapaian Sasaran 23
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	B	B	100%

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 mencapai 79,31 dan termasuk predikat “Baik” sebagaimana disajikan pada tabel 3.23 di atas.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.23.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	B	B	B	B	100	100	100

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 yaitu B dengan realisasi tahun 2020 dengan nilai B, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 100% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.23.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021
1	2	3	4	5
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	B	B	100%



Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 sebesar B dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar B, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari survei kepuasan masyarakat pada lokus 7 OPD, terdiri dari 48 perangkat daerah pelaksana teknis. Capaian IKM tahun 2021 juga lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 di mana pada tahun 2021 terealisasi 79,31% atau meningkat dari tahun sebelumnya. Data hasil survei kepuasan masyarakat secara lengkap yang disusun sesuai peringkat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23.3

Peringkat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Pemerintahan Kabupaten Malinau Tahun 2021

No	NAMA OPD	NILAI IKM SETELAH DIKONVERSIKAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83,16	B	Baik
2	Dinas Lingkungan Hidup	78,92	B	Baik
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78,44	B	Baik
4	Dinas Perhubungan	78,75	B	Baik
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	76,86	B	Baik
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan	78,65	B	Baik



	Kawasan Permukiman			
7	RSUD	80,40	B	Baik
NILAI IKM KAB. MALINAU		79,31	B	Baik

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2021

Dari data tabel diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara umum kualitas pelayanan pada OPD yang melaksanakan pelayanan publik di Kabupaten Malinau dipersepsikan baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisaran di antara 76,61-88,30. Nilai IKM yang diperoleh yaitu pada 9 unsur pelayanan =79,31.

Dari nilai unsur terendah masing-masing OPD dapat diketahui masalah atau kendala yang ada pada masing-masing OPD dalam memberikan pelayanan publik yang optimal berbeda-beda. Dari kendala atau masalah yang pada OPD tersebut maka diberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 adalah dengan keterbatasan SDM dan anggaran dalam melakukan penyebaran kuesioner sehingga berdampak dalam penyebara kuesioner yang harus dilakukan yang berakibatkan tidak semua pemohon merespon terhadap kuesioner. Sehingga rekomendasi terhadap hal ini adalah;

1. Penyebaran kuesioner diperlukan melalui media yang lebih efektif.
2. Disipkannya lebih banyak SDM untuk melakukan penyebaran kuesioner kepada responden/masyarakat secara langsung.
3. Menyediakan anggaran yang cukup untuk dapat melaksanakan survey kepuasan masyarakat.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan program tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.23.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Program fasilitas pelayanan publik	99,46%

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai angka 100% dengan rata-rata realisasi keuangan 99,46%. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program fasilitas pelayanan publik adalah Rp. 129.588.800, sementara pagu biaya untuk program fasilitas pelayanan publik yaitu Rp 130.288.800. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran 99,46%. Persentase efisiensi ini dapat diasumsikan pada tahun 2021 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya anggaran.

C. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah.



Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021
1	2	3
PENDAPATAN - LRA	1,357,613,033,544.00	1,419,812,373,881.41
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PDA) - LRA	47,446,020,648.00	74,809,719,848.04
Pajak Daerah - LRA	11,717,281,000.00	13,866,573,016.00
Retribusi Daerah - LRA	1,650,722,500.00	2,408,229,534.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan -LRA	3,325,430,716.00	3,503,009,671.36
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	30,752,586,432.00	55,007,327,463.68
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1,292,477,012,896.00	1,324,456,399,963.37
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA	1,239,581,673,000.00	1,263,641,709,113.00
Dana Perimbangan	1,048,810,838,000.00	1,072,870,874,113.00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	152,466,924,000.00	184,538,596,041.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	780,635,100,000.00	779,926,601,361.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	67,053,682,000.00	64,578,624,516.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	48,655,132,000.00	43,827,052,195.00
Dana Insentif Desa (DID)	19,625,186,000.00	19,625,186,000.00
Dana Desa	171,145,649,000.00	171,145,649,000.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	52,895,339,896.00	60,814,690,850.37
Pendapatan Bagi hasil pajak - LRA	40,712,198,986.00	48,631,549,939.90
Bantuan Keuangan	12,183,140,910.00	12,183,140,910.47
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17,690,000,000.00	20,546,254,000.00
Pendapatan Hibah - LRA	0,00	2,511,000,000.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA	17,690,000,000.00	18,035,254,000.00
BELANJA DAERAH	1.455.682.046.350,00	1.353.551.185.811,19
BELANJA OPERASI	981.783.830.390,00	900.121.416.079,19
Belanja Pegawai	543.355.773.950,00	505.155.869.372,00
Belanja Barang dan Jasa	407.119.218.104,00	368.895.538.503,19
Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	2.393.507.500,00
Belanja Hibah	23.259.625.136,00	20.982.118.202,00
Belanja Bantuan Sosial	3.049.213.200,00	2.694.382.502,00
BELANJA MODAL	111.172.312.460,00	101.357.607.237,00
Belanja Modal Tanah	1.444.091.277,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.895.084.300,00	54.902.417.219,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.445.773.681,00	14.725.005.950,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.311.695.700,00	30.695.745.068,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.075.667.502,00	1.034.439.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	35.946.518.500,00	25.292.777.495,00
Belanja Tak Terduga	35.946.518.500,00	25.292.777.495,00
BELANJA TRANSFER	326.779.385.000,00	326.779.385.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	326.779.385.000,00	326.779.385.000,00



SURPLUS/DEFISIT	(98.069.012.806,00)	66.261.188.000,22
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101.069.012.806,00	100.581.169.024,69
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.069.012.806,00	100.581.169.024,69
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
PEMBIAYAAN NETTO	98.069.012.806,00	97.581.169.024,69
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	0,00	163.842.357.024,91

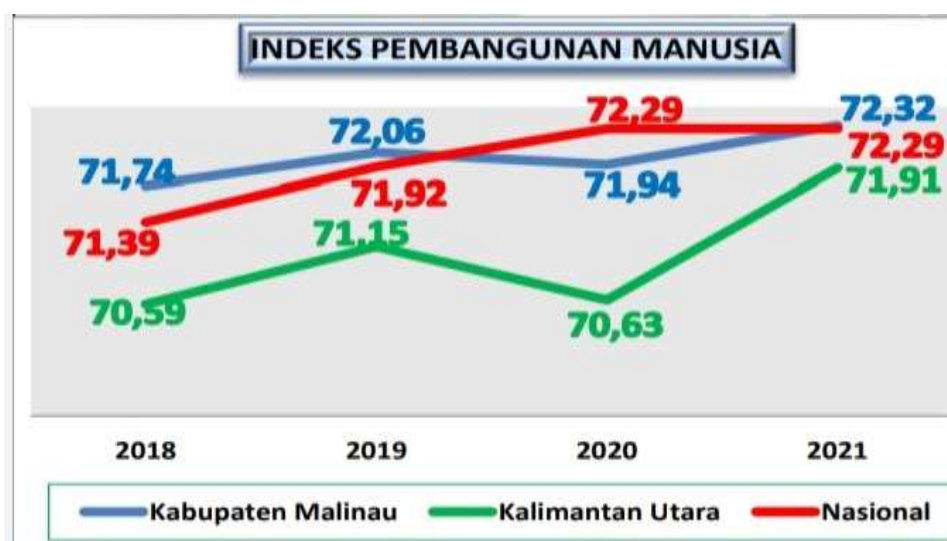
Sumber Data : BPKD Kabupaten Malinau

BAB IV

PENUTUP

Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2021 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Malinau, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Kabupaten Malinau. Meskipun disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para *stakeholder* dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau selama tahun 2021 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya.

Dalam mewujudkan misi pertama yakni meningkatnya kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik maka untuk mendukung keberhasilan misi tersebut diatas dapat di lihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tujuan dari indikator dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tujuannya. Pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malinau dengan terget RPJMD tahun 2016-2021 adalah 72,16 dan realisasi 72,32 sehingga capaian untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah 100,2%.



Gambar Indeks Pembangunan manusia



Di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Malinau akan senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan untuk lebih menyempurnakan pelaporan kinerja ini. Berbagai hasil yang telah diraih oleh Kabupaten Malinau selama ini akan selalu dijadikan modal berharga untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang terjadi dijadikan pelajaran berharga untuk melangkah menuju Malinau yang lebih baik di hari esok.

Mengingat masih ada kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Malinau pada tahun 2021, dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk tahun-tahun mendatang akan tetap difokuskan pada :

- Peningkatan dalam pelayanan publik.
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Government*).
- Peningkatan sistem informasi kinerja pemerintah daerah.
- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja.

Dengan tersusunnya Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergis, inovatif dan kolaboratif bersama masyarakat dan semua pihak.



LAMPPIRAN



**DAFTAR PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN DARI PEMERINTAH PUSAT
SERTA LEMBAGA NIRLABA YANG DIANUGERAHKAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021**

NO	NAMA PENGHARGAAN
1	Piagam penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2021. Pada bidang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki prestasi yang sangat baik yaitu selama tujuh tahun berturut-turut yaitu tahun anggaran 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 memperoleh piagam penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2	Penghargaan sebagai Top Pembina BUMD tahun 2021 kepada Bupati Malinau
3	Pemenang Penghargaan Perumda Air Minum Apa' Mening sebagai Top Of The Top BUMD 2021, Top BUMD Award 2021 Bintang Lima dan Top CEO BUMD 2021.
4	Penghargaan Terbaik dua dalam pengelolaan DAK Fisik Tahun 2021
5	Penghargaan KU-JEK Indonesia sebagai Juara I dalam Lomba Inovasi daerah Provinsi Kalimantan Utara Bidang Ekonomi di masa Pandemi Covid 19 tahun 2021
6	Piagam penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dari Bappenas sebagai nominasi dan kategori Perencanaan Dan Pencapaian Daerah Tingkat Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah 2021
7	Piagam Penghargaan Juara II Kategori Kalaborasi Lintas Sektor atas Inovasi Cegah Stunting dari BKKBN (judul: Aksi Stunting Pemda Kabupaten Malinau, Kaltara)



Selamat & Sukses

KEPADA :
WEMPI WELLEM MAWA, SE
BUPATI MALINAU

Atas Pemenang Penghargaan :

TopBusiness
TOP
BUMD
AWARDS
2021

SEBAGAI :
TOP PEMBINA BUMD 2021

Organized by:
TopBusiness

Supported by:
 

 Perumda Am Apa'Mening  apa.mening  pdamapamening.co.id

Terimakasih
Kepada Segenap Pelanggan & Para Mitra
Berkat dukungan, kolaborasi, masukan dan saran
sehingga kami dapat terus berbenah

PERUMDA AIR MINUM APA' MENING
PEMENANG PENGHARGAAN :

TopBusiness
TOP
BUMD
AWARDS
2021

TOP OF THE TOP BUMD 2021
TOP BUMD AWARD 2021 ★★★★★
TOP CEO BUMD 2021



Organized by:
TopBusiness

Supported by:
 

 Perumda Am Apa'Mening  apa.mening  pdamapamening.co.id





